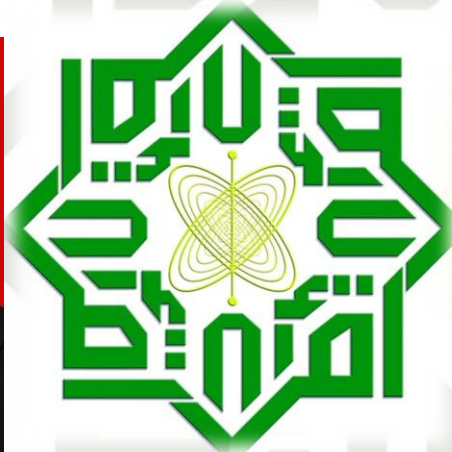




Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau



UIN SUSKA RIAU

Disusun Oleh :

DEDRI ALVIAN
NIM. 11622103801

PROGRAM S1

JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM

RIAU, PEKANBARU

1441 H/ 2020 M



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **“Pelaksanaan Akad *Musaqah* Antara Pemilik Kebun Karet Dengan Penyadap Dalam Perspektif Fiqih Muamalah (Studi Kasus Desa Pangkalan Kapas Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar)”**, yang ditulis oleh:

Nama : DEDRI ALVIAN

NIM : 11622103801

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 24 Juni 2020

Pembimbing Skripsi,

Drs. H. Suhayib, M.Ag

NIP. 196312311992031037

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta dimiliki UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Pelaksanaan Akad *Musaqah* Antara Pemilik Kebun Karet Dengan Penyadap Dalam Perspektif Fiqih Muamalah (Studi Kasus Desa Pangkalan Kapas Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar)**, yang ditulis oleh :

Nama : **Dedri Alvian**
 NIM : 11622103801
 Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari / Tanggal : Selasa, 11 Agustus 2020
 Waktu : 08.00 WIB
 Tempat : Rumah (*Daring*)

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 19 Agustus 2020

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

Drs. H. Zainal Arifin, MA

.....

Sekretaris

Basir, S. HI., MH.

.....

Penguji I

Dra. Nurlaili, M. SI

.....

Penguji II

Hendri Sayuti, M.Ag

.....

Mengetahui :

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag

NIP. 19580712 196803 1 005



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto:

Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, (Al-maidah 02)

“Jadilah dirimu sendiri dan Lawan rasaa takutmu dengan Usaha, Keyakinan serta Do’a”

Kupersembahkan skripsi ini kepada:

- ❖ Ayahanda Dasril dan Ibunda Darnilis yang tercinta yang mendidiku dan berkorban demi keberhasilanku
- ❖ Adik-Adikku Deska Ayu Ningsih, Diva Oktaviani, Dilla Marseli, Devin Alvino dan Daniah Apriliani
- ❖ Keluarga Besarku
- ❖ Dosen-dosen tersayang
- ❖ Rekan-rekan seperjuangan angkatan 2016 jurusan Hukum Ekonomi Syari’ah (Muamalah), serta teman-temanku yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.
- ❖ Almamater kebanggaanku UIN Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Decri Alvian, (2019): Pelaksanaan Akad *Musaqah* Antara Pemilik Kebun Karet Dengan Penyadap Dalam Perspektif Fiqih Muamalah (Studi Kasus Desa Pangkalan Kapas Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar)

Penulisan skripsi ini dilatar belakangi oleh masyarakat yang mayoritas petani karet. Dalam *Fiqih* Muamalah akad Bagi Hasil kebun karet antara pemilik kebun dan penyadap dikenal dengan istilah akad *Musaqah* yaitu suatu akad penyerahan pepohonan kepada orang yang mau menggarapnya dengan ketentuan hasil getah karetnya dibagi di antara mereka berdua, pada umumnya sistem pelaksanaan akad *Musaqah* ini hanya dilakukan berdasarkan akad lisan yang tidak ada kekuatan hukum, sehingga banyak memberi peluang antara kedua belah pihak melakukan hal-hal yang dapat merugikan salah satu pihak terhadap pihak lain.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana sistem pelaksanaan akad *Musaqah* antara pemilik kebun karet dengan penyadap di Desa Pangkalan Kapas Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar dan bagaimana tinjauan *Fiqih* Muamalah terhadap pelaksanaan akad *Musaqah* antara pemilik kebun karet dengan penyadap di Desa Pangkalan Kapas Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sistem pelaksanaan akad *Musaqah* antara pemilik kebun karet dan penyadap di Desa Pangkalan Kapas Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar dan untuk mengetahui pandangan *Fiqih* Muamalah terhadap pelaksanaan akad *Musaqah* antara pemilik kebun karet dengan penyadap di Desa Pangkalan Kapas Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*) dan data primer dikumpulkan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Pengelolaan data tersebut kemudian dianalisis secara *deskriptif kualitatif* yaitu menguraikan data menggambarkan mengenai pokok permasalahan yang ada, kemudian penguraian tersebut dapat diambil kesimpulan dengan secara *deduktif*.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa sistem pelaksanaan akad *Musaqah* antara pemilik kebun Karet dan penyadap yang dilakukan oleh masyarakat Desa Pangkalan Kapas Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar itu dengan cara pembagian dari hasil getah karet tersebut dibagi menurut kesepakatan antara pemilik kebun dan penyadap dengan menyebutkan bagian hasil dengan jelas yaitu, 1/3. Akad perjanjian kerjasama ini dilakukan secara lisan menurut mereka hal tersebut lebih mudah dan tidak lama dari pada sistem perjanjian yang tertulis. Jadi mengenai pembagian hasil getah karet tersebut di tinjauan dari hukum tidak bertentangan dengan Hukum Islam.

sedangkan menurut tinjauan *Fiqih* Muamalah tidak bertentangan dengan hukum Islam karena sudah memenuhi syarat dan rukunnya, hanya saja dalam sistem perjanjiannya dilakukan secara lisan tanpa disaksikan oleh saksi-saksi dan prosedur hukum yang mendukung. Maka perjanjian akad *Musaqah* ini sah dan di bolehkan menurut Syari'at Islam.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 22 Januari 1988 Nomor: 157/1987 dan 0593b/1987.

A. Konsonan Tunggal

Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	b	Be
ت	ta	t	Te
ث	Ṡa	Ṡ	s (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	Ḥa	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

س	Ṣad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ڌ	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ٲ	Ṭa	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ز	Za	Z	zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik diatas
ج	gain	g	ge
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	ki
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wau	w	we
ه	ha	h	ha
ء	hamzah	‘	apostrof
ي	ya	y	ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’).

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia yang terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fathah</i>	a	a
اِ	<i>kasrah</i>	i	i
اُ	<i>ḍammah</i>	u	u

Vokal rangkap dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَيَ	<i>fathah dan yā'</i>	ai	a dan i
اُو	<i>fathah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh:

اَلْفَ عَلَ : *fa'ala*

سُئِلَ : *su'ila*

C Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ... اِي	<i>fathah dan alif atau yā'</i>	ā	a dan garis di atas
اِ...	<i>kasrah dan yā'</i>	ī	i dan garis di atas
اُ...	<i>ḍammah dan wau</i>	ū	u dan garis di atas



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Contoh:

قِيلَ : *māta* : *qīla*

يَمُوتُ : *ramā* : *yamūtu*

D. *Tā' Marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua, yaitu, *tā' marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah* transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *tā' marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha [h].

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-aṭfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hīkmah*

E. *Syaddah* (Tasydīd)

Syaddah atau tasydīd yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydīd, dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *najjainā* : رَبَّنَا : *rabbānā*

نُحْمُ : *nu'ima* : الْحَقُّ : *al-ḥaqq*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Jika huruf *kasrah* (ي) ber-tasydīd di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *maddah* menjadi ī.

Contoh:

علي : 'Alī (bukan 'Aliyy atau 'Aly)

عربيّ 'Arabī (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الْفَلَسَفَةُ : al-falsafah (bukan asy-syamsu) : الشَّمْسُ al-syamsu

الْبِلَادُ : al-bilādu (bukan az-zalzalāh) : الزَّلْزَلَةُ al-zalzalāh

G. Hamzah

Aturan transliterasi huruf *hamzah* menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila *hamzah* terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa *alif*.

Contoh:

شيء : syai'un (bukan ta'murūna) : تَامُرُونِ ta'murūna

أُمِرْتُ : umirtu (bukan al-nau) : النَّوْعُ al-nau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

H. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata al-Qur'an (dari al-Qur'ān), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi

secara utuh.

Contoh:

Fī Zilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

I. Lafaz al-Jalālah (الله)

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf *hamzah*.

Contoh:

دِينُ اللهِ : *dīnullāh*

بِالله : *billāh*

Adapun *tā' marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada lafaz al- al-Jalālah, ditransliterasi dengan huruf [t].



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fi rahmatillāh*

J. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman Ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang *al-*, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh:

وَمَا لَزَمْدُ إِلَّا رَسُولٌ	<i>Wa mā Muḥammadun illā rasūl</i>
إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ	<i>Inna awwala baitin wuḍi'a linnāsi</i>
مُبَارَكاً	<i>lallaẓī bi Bakkata mubārakan</i>
شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ	<i>Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fīh</i>
	<i>al-Qur'ānu</i>
وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ	<i>Syahru Ramaḍānal-laẓī unzila fīhil-</i>
	<i>Qur'ānu</i>
	<i>Wa laqad ra'āhu bil-ufuq al-mubīn</i>
	<i>Wa laqad ra'āhu bil-ufuqil-mubīni</i>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

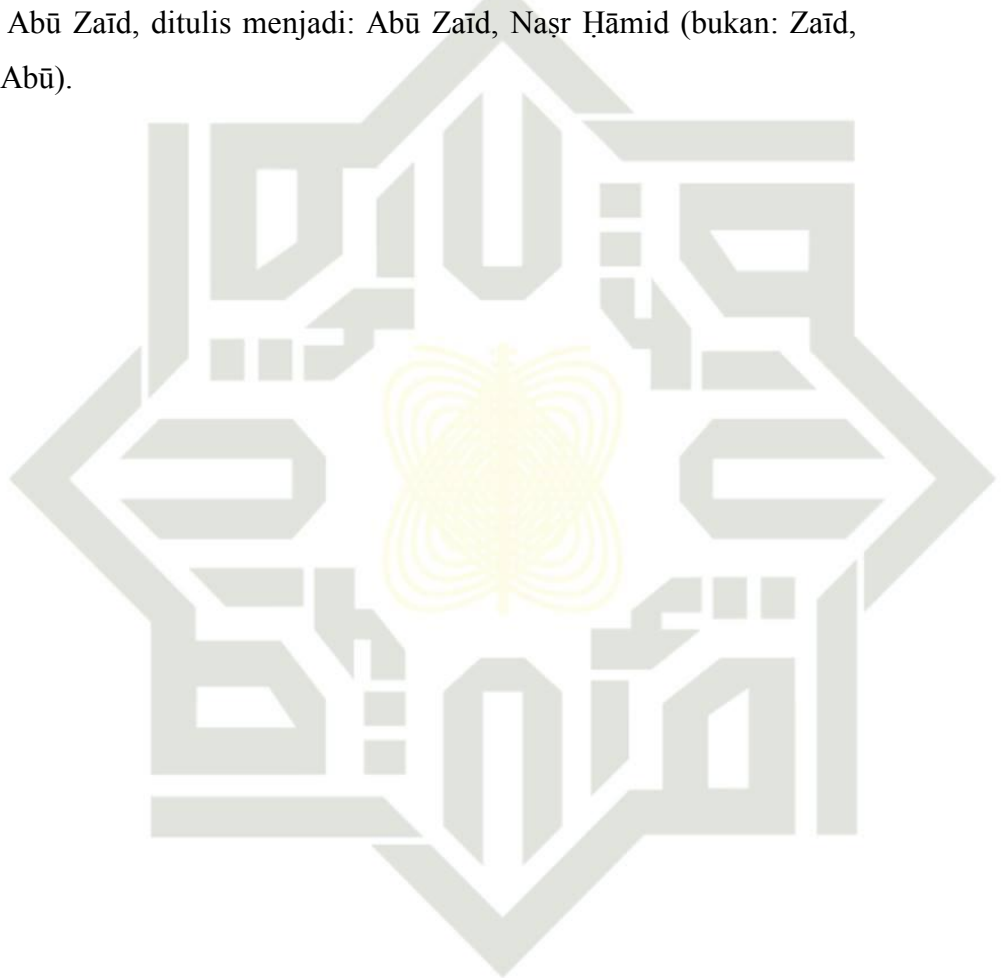
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abū al-Walīd Muḥammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad Ibnu).

Naṣr Ḥāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Naṣr Ḥāmid (bukan: Zaīd, Naṣr Ḥāmid Abū).



UIN SUSKA RIAU



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum Waromatullahi Wabarokatu

Alhamdulillah, puji syukur penulis sampaikan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufiq serta nikmat-Nya, yang selalu mendengarkan doa hamba-Nya, yang senantiasa memberikan petunjuk dalam setiap masalah dan selalu memberikan kemudahan dalam setiap kesulitan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau.

Shalawat dan salam senantiasa selalu diberikan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa Islam sebagai pelita dalam kegelapan Jahiliyah sehingga umatnya bisa menikmati manisnya Islam dan Iman hingga saat ini.

Alhamdulillah setelah dengan usaha, doa dan tawakal kepada Allah SWT akhirnya skripsi ini bisa terselesaikan dengan baik dan tepat pada waktunya. Dengan kerendahan hati yang terdalam penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala bantuan, kerjasama, dorongan semangat, bimbingan, petunjuk dan juga nasihat dari berbagai pihak, yaitu :

1. Kedua orang tua ayahanda Dasril, dan ibunda Darnilis yang sangat saya sayangi dan cintai. Yang senantiasa mendoakan memberikan semangat, bimbingan, dukungan baik berupa moril maupun materil serta memberikan perhatian yang sangat besar kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Prof. Dr. Akhmad Mujahidin, MA., selaku Rektor UIN Suska Riau, Dr. Drs. H. Suryan A. Jamrah, Ma., selaku Wakil Rektor I, Dr. H. Kusrini M.Pd selaku Wakil Rektor II, Drs. H. Promadi MA., Ph.D., selaku Wakil Rektor III. Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Bapak Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum beserta Bapak Dr. Heri Sunandar, M.Cl sebagai Wakil Dekan I, Bapak Dr. Wahidin, M.Ag sebagai Wakil Dekan II, Bapak Dr. Maghfirah, M.A sebagai

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Wakil Dekan III. Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau.

4. Bapak Drs. H. Zainal Arifin, MA, selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah), beserta ibu Dra. Nurlaili, M.Si, selaku Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah) pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Bapak Drs. H. Suhayib, M.Ag selaku Dosen Pembimbing yang selalu memberikan dukungan serta petunjuk dan meluangkan waktunya untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Seluruh perangkat Kepala Desa Pangkalan Kapas dan masyarakatnya yang telah bersedia di wawancarai dan memberi data-data, serta informasi yang diperlukan dalam penelitian ini.
7. Pimpinan dan Staf perpustakaan UIN Suska Riau yang banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Dosen Penasehat Akademik, Bapak Kamiruddin, M.Ag yang telah membimbing selama masa perkuliahan.
9. Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah), Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Suska Riau yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu. Terima kasih atas segala ilmu dan pengetahuan yang bermanfaat bagi penulis selama menuntut ilmu serta karyawan/ti dan segenap civitas akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Suska Riau.
10. Teman-teman di Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah) Angkatan 2016 yang tidak dapat saya sebutkan namanya satu-persatu, serta para senior dan junior Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah) yang telah memberikan sumbangan saran dan bantuan motivasi lainnya.

Sekiranya masih banyak lagi yang membantu penulis dan namanya tidak disebutkan satu persatu dalam kata pengantar ini, penulis hanya bisa mengucapkan terima kasih, semoga Allah SWT memberikan limpahan kebaikan dan pahala. Walaupun demikian, skripsi ini merupakan tanggung jawab penulis.

Pekanbaru, 22 Juni 2020

Penulis,

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
PEDOMAN TRANSLITERASI	ii
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL.....	xv
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	5
C. Rumusan Masalah	5
D. Tujuan Dan kegunaan Penelitian	6
E. Kajian Pustaka	7
F. Manfaat Penelitian	8
G. Metode Penelitian	8
H. Sistematika Pembahasan	13
 BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	
A. Sejarah Berdirinya dan Letak Geografis Desa Pangkalan Kapas .	15
B. Jumlah penduduk Desa Pangkalan Kapas	19
C. Keadaan Sosial	20
 BAB III LANDASAN TEORI	
A. Pengertian Aqad (Perjanjian)	27
B. Rukun dan Syarat Akad (Perjanjian)	29
C. Implikasi Akad	32
D. Bagi Hasil Menurut Hukum Islam	32
1. Sistem Bagi Hasil	32
2. Macam-Macam Bentuk Akad Bagi Hasil Dalam Bidang Pertanian	34
3. Pengertian <i>Musaqah</i>	35
4. Dasar Hukum <i>Musaqah</i>	38
5. Rukun dan Syarat <i>Musaqah</i>	41
6. Hukum <i>Musaqah</i> shahih dan fasid	43
7. Berakhirnya Akad <i>Musaqah</i>	48



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

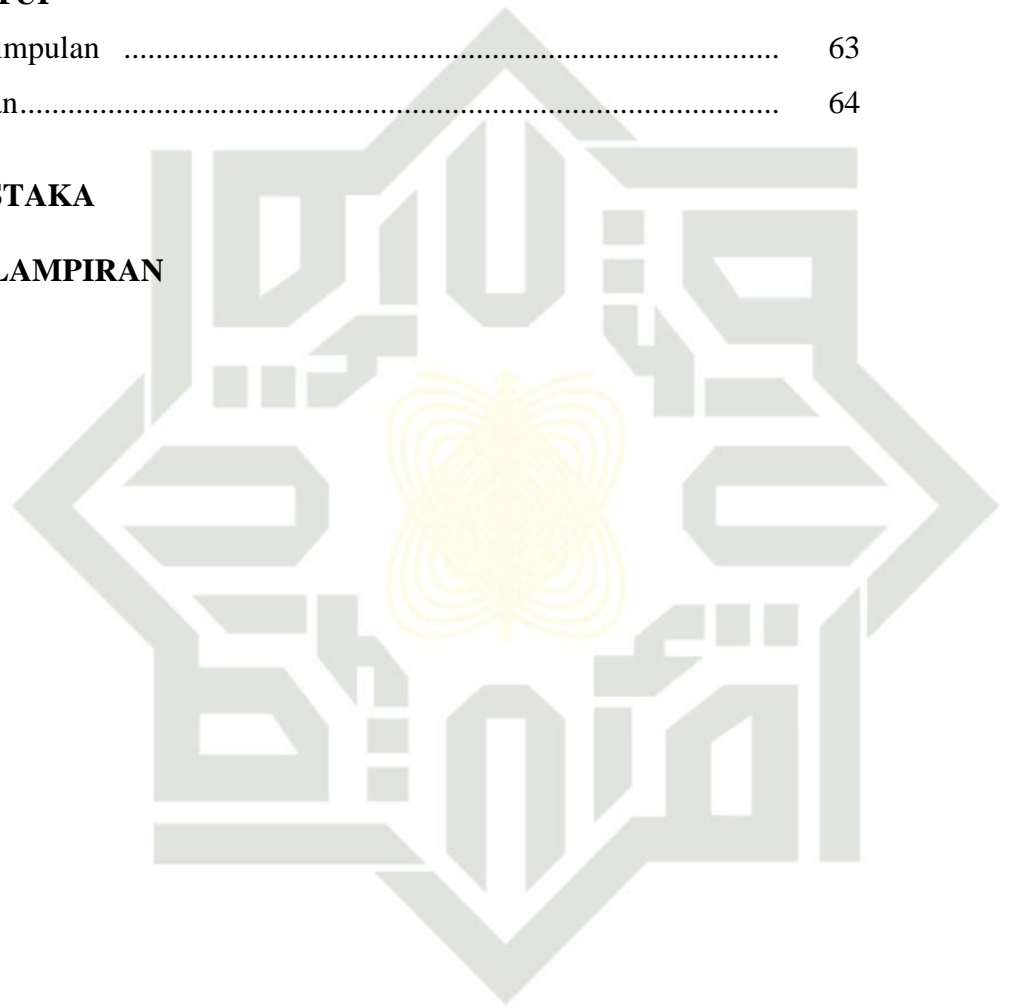
A. Sistem Pelaksanaan Akad <i>Musqah</i> Antara Pemilik Kebun Karet Dan Penyadap Desa Di Pangkalan Kapas.....	51
B. Tinjauan <i>Fiqh</i> Muamalah Terhadap <i>Musqah</i> Antara Pemilik Kebun Karet Dan Penyadap Di Desa Pangkalan Kapas.....	56

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	63
B. Saran.....	64

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN



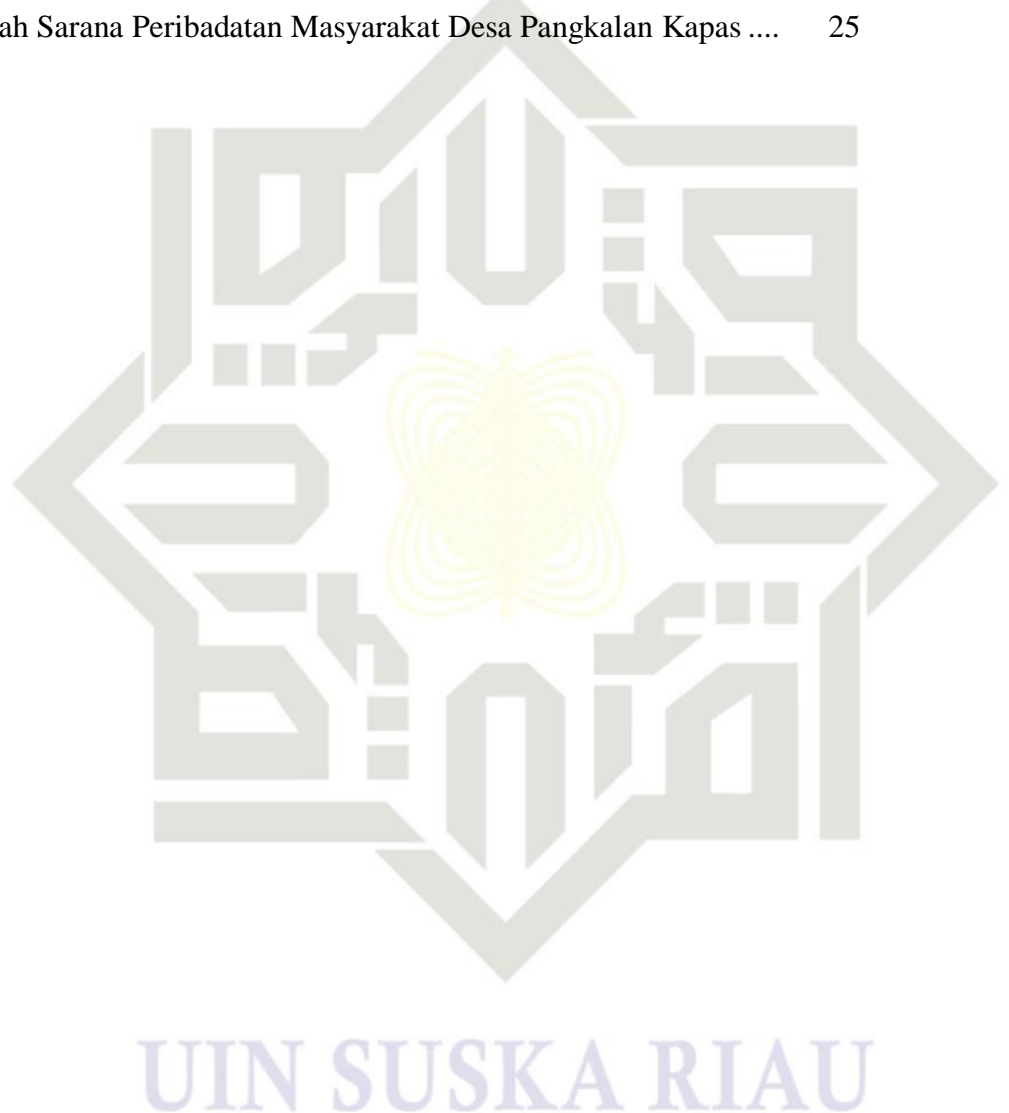
UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Jumlah Penduduk Desa Pangkalan Kapas Dilihat Berdasarkan Jenis Kelamin	19
Tabel 2.2	Pendidikan Masyarakat Desa Pangkalan Kapas.....	20
Tabel 2.3	Sumber Penghasilan Masyarakat Desa Pangkalan Kapas	23
Tabel 2.4	Jumlah Sarana Peribadatan Masyarakat Desa Pangkalan Kapas	25



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum Islam adalah hukum yang mengatur segala perbuatan manusia, baik itu badan maupun sosial. Kegiatan sosial merupakan salah satu aspek muamalah dari sistem Islam, sehingga kaedah *fiqh* yang digunakan dalam mengidentifikasi dan transaksi-transaksi sosial juga digunakan *Fiqh* Muamalah. *Fiqh* secara *etimologi* adalah mengerti atau paham, secara terminologi *Fiqh* adalah pengetahuan tentang syariat Islamiah yang berkaitan dengan perbuatan manusia yang telah dewasa dan berakal sehat yang diambil dari dalil-dalil terperinci.¹

Sedangkan *muamalah* secara bahasa adalah saling bertindak, saling berbuat dan saling mengamalkan. Sedangkan menurut istilah pengertian *muamalah* dapat dibagi dua macam, yaitu pengertian *muamalah* dalam artian sempit dan pengertian *muamalah* dalam artian luas. Dalam arti sempit (khas) adalah aturan-aturan Allah yang wajib ditaati yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dengan kaitannya dengan cara memperoleh dan mengembangkan harta benda. Sedangkan pengertian *muamalah* dalam arti luas adalah aturan-aturan (hukum) Allah untuk mengatur manusia dalam kaitannya dengan urusan duniawi dalam pergaulan sosial². Persamaan pengertian *muamalah* dalam arti sempit dengan pengertian *muamalah* dalam arti luas adalah sama-sama mengatur

¹ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Amzah, 2014), hlm 15

² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), cet. ke-9, hlm. 1-3

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hubungan manusia dengan manusia dalam kaitan dengan pemutaran harta.

Setiap manusia hidup bermasyarakat, saling tolong menolong dalam menghadapi berbagai macam persoalan untuk menutupi kebutuhan antara yang satu dengan yang lainnya, ketergantungan seseorang kepada yang lain dirasakan ketika manusia itu lahir. Setiap manusia mempunyai kebutuhan sehingga terjadi pertantangan-pertantangan kehendak. Untuk menjaga keperluan masing-masing, perlu ada aturan-aturan yang mengatur kebutuhan manusia agar manusia itu tidak melanggar hak-hak lain.

Dalam ajaran Islam telah ditetapkan bahwasanya bermasyarakat hendaklah selalu tolong menolong. Dalam hal ini Allah SWT berfirman Qs. al-Maidah (5): 2

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ
الْعِقَابِ

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”

Ayat diatas menerangkan bahwasanya Islam itu mengkehendaki agar tiap-tiap kamu hendaklah saling tolong-menolong dalam kebaikan terhadap sesamanya, dalam hal ini pula Islam juga menghendaki terhadap sesamanya supaya saling memberi bantuan yang patut di kala perlu dan berusaha menghasilkan mamfaat bagi orang lain dan melarang tolong menolong dalam hal keburukan.

Menurut *Fiqih Muamalah*, ada beberapa sistem kerjasama yang dikenal dengan istilah *muzara'ah*, *mudharabah* dan *Musaqah*. Bentuk kerja sama tersebut

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

banyak dilakukan oleh umat manusia. Salah satu bentuk kegiatan dalam muamalah adalah *Musaqah* yang berarti kerja sama antara pihak pemilik kebun dan petani penggarap dengan tujuan agar kebun itu dipelihara dan dirawat sehingga memberikan hasil yang maksimal. Kemudian, segala sesuatu yang dihasilkan pihak kedua berupa hasil itu merupakan hak bersama antara pemilik dan penggarap sesuai dengan kesepakatan yang mereka buat. Kerja sama dalam bentuk musyqaqah menurut kebanyakan Ulama *Fiqh* hukumnya mubah (boleh) bila dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Islam.³

Sumber dalil hukum syara' atau pemakaian dalil dalam penghasilan hukum syara', harus bersumber pada sumber yang telah ditetapkan Rasul, yang menjelaskan bahwa sumber pertama dari dalil hukum syara' adalah al-Qur'an, kedua Hadits, yang ketiga adalah *Ijtihad*.⁴ Aktivitas berusaha dan bekerja sangat dipengaruhi oleh kondisi dimana masyarakat hidup. Kenyataan bahwa mayoritas masyarakat Indonesia hidup dan bermukim di daerah perdesaan dan menggantung hidup mereka disektor pertanian dan perkebunan. Tidak terkecuali masyarakat di Desa Pangkalan Kapas, baik sebagai petani di lahan sendiri maupun sebagai petani penyedap karet di lahan milik orang lain.

Pembagian keuntungan lahan dilakukan melalui tingkat hasil yang didapat, bahkan ditetapkan dengan jumlah yang pasti. Menentukan jumlah ke untungan secara pasti kepada pihak si pengelola akan menjadikan perjanjian tidak berlaku. Si pengelola tidak diperkenankan untuk turut serta menyediakan modal karena

³ Abdul Rahman Ghazali Dkk, *Fiqih Muamalat* (Jakarta: Kencana, 2012), cet. ke-1, hlm. 115

⁴ *Ibid*, hlm. 113

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

semua ditanggung oleh pemilik lahan.⁵

Kerjasama semacam ini dipraktekkan oleh masyarakat Desa Pangkalan Kapas, disamping mengelolah kebun miliknya sendiri juga mempekerjakan orang lain untuk menyadap karetnya dengan sistem bagi hasil dan ada juga yang pemilik kebun karet ini yang pergi merantau tidak bertempat tinggal dikampungnya lagi dan disuruhnya orang lain untuk mengelolah kebun karet miliknya tersebut. Yang di dalam kehidupan masyarakat setempat di kenal dengan istilah *nokok karet* (memotong karet) dan dalam kepustakaan islam hampir mirip dengan istilah *Musaqah*, yaitu suatu sistem persekutuan perkebunan antara pemilik kebun karet satu pihak dengan penyadap karet pihak lain dengan sistem bagi hasil.

Menurut analisa penulis, terdapat beberapa kejanggalan dalam pelaksanaan akad tersebut yaitu akadnya dilaksanakan secara lisan tanpa disaksikan oleh saksi-saksi dan prosedur hukum yang mendukung. Pelaksanaan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum, sehingga tidak ada bukti yang kuat telah terjadi kerja sama kedua belah pihak. Hal inilah yang menyebabkan terjadinya beberapa pelanggaran terhadap kerja sama yang telah disepakati sehingga merugikan salah satu pihak, misalnya penyedap menjual hasil kebun secara diam-diam kepada orang lain tanpa sepengetahuan pemilik kebun.

Selain itu, Pembagian keuntungan dari hasil lahan ditetapkan dalam jumlah yang pasti, dimana pemilik lahan menetapkan setoran hasil lahan tersebut berdasarkan luas kebun karet. Biasanya setoran itu diberikan dalam jangka waktu sekali dalam sebulan. Hal ini tentunya akan mendatangkan unsur ketidakadilan,

⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: Amzah, 2010), cet. ket-1, hlm. 393-

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

lantaran dalam menentukan pembagian hasil tidak memperhatikan kestabilan harga karet, cuaca, kondisi ekonomi dalam memenuhi kebutuhannya.

Pangkalan Kapas merupakan salah satu Desa di Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar yang sebagian besar penduduknya hidup dari perkebunan karet. Sistem yang dipakai dari petani penduduk setempat bermacam-macam sesuai kondisi adat setempat. Ada yang mengelola sendiri ada juga yang bekerjasama untuk mengelola dengan sistem bagi hasil. Beranjak dari beberapa permasalahan tersebut, penulis tertarik untuk mengetahui lebih dalam sehingga termotivasi mengadakan penelitian dengan judul: **“Pelaksanaan Akad *Musaqah* Antara Pemilik Kebun Karet dengan Penyadap dalam Perspektif Fiqih Muamalah (Studi Kasus Desa Pangkalan Kapas Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar)”**.

B. Batasan Masalah

Untuk menghindari terjadinya kerancuan dalam pembahasan ini, maka perlu dibatasi tentang pelaksanaan akad *Musaqah* antara pemilik kebun karet dengan penyadap di Desa Pangkalan Kapas Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar pada tahun 2019.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, yang menjadi fokus permasalahan di dalam penelitian ini adalah tentang: “pelaksanaan akad *Musaqah* antara pemilik kebun karet dengan penyadap dalam perspektif Fiqih Muamalah (Studi kasus Desa Pangkalan Kapas Kecamatan Kampar Kiri Hulu

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Kabupaten Kampar)

Untuk lebih memudahkan penulis, maka fokus permasalahan pokok tersebut dibagi menjadi dua sub masalah, yakni sebagai berikut:

1. Bagaimana sistem pelaksanaan akad *Musqah* antara pemilik kebun karet dengan penyadap di Desa Pangkalan Kapas Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar?
2. Bagaimana tinjauan Fiqih Muamalah terhadap pelaksanaan akad *Musqah* antara pemilik kebun karet dengan penyadap di Desa Pangkalan Kapas Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar?

D. Tujuan Penelitian

Penelitian tentang pelaksanaan akad *Musqah* antara pemilik kebun karet dengan penyadap dalam perspektif Fiqih Muamalah Studi kasus Desa Pangkalan Kapas Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar ini bertujuan untuk memberikan suatu pengetahuan baru di bidang muamalah yang semakin hari semakin bertambah pula masalah-masalah yang timbul, sehingga dibutuhkan suatu ilmu baru pula untuk menjawabnya.

Tujuan yang ingin dicapai di dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui tentang sistem pelaksanaan akad *Musqah* antara pemilik kebun karet dengan penyadap di Desa Pangkalan Kapas Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar
2. Untuk mengetahui pandangan fiqih muamalah terhadap pelaksanaan akad *Musqah* antara pemilik kebun karet dengan penyadap di Desa Pangkalan Kapas Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

E. Kajian Pustaka

Pembahasan dan kajian tentang sistem pelaksanaan akad (*Musaqah*) merupakan bentuk muamalah yang di kenal dan telah dipraktekkan sejak zaman Rasulullah SAW, dan sudah banyak terdapat dalam kitab-kitab fikih, karya ilmiah, dan literature-literatur keislaman yang lain. Secara umum bagi hasil (*Musaqah*) dibahas mengenai pengertian *Musaqah*, dasar hukum *Musaqah*, rukun *Musaqah* dan syarat *Musaqah*. Dan sepengetahuan penulis belum ada yang mengangkat judul tentang Pelaksanaan Akad *Musaqah* Antara Pemilik Kebun Karet Dengan Penyadap.

Karya ilmiah yang membuat penyusun mendapat inspirasi untuk melakukan penelitian lapangan tentang sistem pelaksanaan akad (*Musaqah*) adalah skripsi yang berjudul “Pelaksanaan Akad *Musaqah* Antara Pemilik Kebun Karet Dengan Penyadap Dalam Perspektif Fiqih Muamalah” yang mana dalam skripsi ini menerangkan bahwa pelaksanaan akad tersebut dilaksanakan secara lisan tanpa disaksikan oleh saksi-saksi dan prosedur hukum yang mendukung dan bagi hasil keuntungan lahan tersebut ditetapkan dengan jumlah yang pasti, dimana pemilik lahan menetapkan setoran dalam jangka waktu sekali sebulan berdasarkan luas kebun karet.

Di dalam dunia perkebunan yang sangat berkembang pada saat sekarang ini seiring dengan kemajuan teknologi sudah banyak yang melakukan berbagai bentuk kerjasama dalam mengelola lahan perkebunannya, maka penyusun berusaha melakukan penelitian terhadap literatur yang relavan terhadap masalah yang menjadi objek penelitian sehingga dapat diketahui sejauh mana perkembangan ilmu pengetahuan tentang masalah tersebut.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

F. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian yang dilakukan ini diharapkan dapat bermanfaat untuk:

1. Manfaat teoritis. Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat dalam pengembangan pengetahuan di bidang Muamalah/Hukum Ekonomi Syariah.
2. Manfaat praktis. Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat terhadap berbagai pihak yang ingin mengetahui tentang pelaksanaan akad *Musaqah* antara pemilik kebun Karet dengan penyadap dalam perspektif Fiqih Muamalah Studi kasus Desa Pangkalan Kapas Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang datanya dinyatakan dalam bentuk verbal dan dianalisis tanpa menggunakan teknis statistik.⁶ Apapun jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang bertujuan melakukan studi yang mendalam mengenai suatu unit sosial yang dilakukan sedemikian rupa sehingga menghasilkan gambaran yang teroganisir, baik dan lengkap mengenai unit sosial tersebut. Penelitian unit sosial ini dimaksud ialah masyarakat khususnya penggarap dan pemilik lahan serta elemen masyarakat lainnya yang bertempat tinggal di Desa Pangkalan Kapas Kecamatan Kampar Kiri

⁶ Etta Mamang Sangadji dan Sopiah. *Metodologi Penelitian, Pendekatan Praktis dalam Penelitian*, (Yogyakarta: CV Andi, 2010), cet. ke-8, hlm. 26

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hulu Kabupaten Kampar

2. Subjek dan Objek Penelitian

- a. Subjek penelitian ini adalah masyarakat yaitu penggarap dan pemilik lahan yang melakukan akad akad *Musaqah* di Desa Pangkalan Kapas Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar
- b. Objek penelitian ini adalah akad *Musaqah* antara pemilik kebun karet dengan penyadap dalam perspektif Fiqih Muamalah Studi kasus Desa Pangkalan Kapas Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar.

3. Populasi dan Sampel

- a. Populasi

Populasi adalah rujukan pada sekelompok orang atau objek yang memiliki kesamaan dalam satu hal atau hal yang membentuk masalah pokok dalam suatu penelitian.⁷ Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian yang merupakan wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang di tetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya⁸. Dengan jumlah masyarakat yang melakukan sistem akad *Musaqah* pada kebun karet sebanyak 10 orang yang terdiri dari 4 orang pemilik kebun karet dan 6 penyadap.

⁷ Muhammad, *Metodelogi Penelitian Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT Rajawali Perasada, 2008), cet. ke-1, hlm. 161

⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, (Bandung: Alfabeta, 2007), cet. ke-10, hlm. 115

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Sampel

Sampel adalah sebagian besar dari populasi.⁹ Karena ia merupakan bagian dari populasi, tentulah ia harus memiliki ciri-ciri yang dimiliki oleh populasinya. Apakah suatu sampel merupakan representasi yang baik bagi populasinya sangat tergantung pada sejauh mana karakteristik sampel itu sama dengan karakteristik populasinya. Karena analisis penelitian didasarkan pada data sampel sedangkan kesimpulannya nanti akan diterapkan pada populasi maka sangatlah penting untuk memperoleh sampel yang representatif bagi populasinya. Untuk itulah diperlukan pemahaman mengenai teknik-teknik pengambilan sampel (*sampling techniques*) yang tepat yaitu siapa yang akan diambil sebagai anggota sampel. Adapun teknik pengambilan sampel yang dilakukan oleh peneliti adalah dengan menggunakan teknik *total sampling* dengan jumlah sampel sebanyak 10 orang.

4. Sumber Data

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yaitu sebuah pendekatan terhadap suatu perilaku, fenomena, peristiwa, masalah atau keadaan tertentu yang menjadi obyek penelitian yang hasil temuannya berupa uraian-uraian kalimat bermakna dan menjelaskan pemahaman tertentu.¹⁰

Sedangkan, sumber data yang diambil dalam penelitian ini

⁹ Saifuddin Azwar, MA. *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), cet. ke-1, hlm. 77

¹⁰ Sonny Leksono, *Penelitian Kualitatif Ilmu Ekonomi*, (Jakarta: Rajawali pers, 2013), cet. ke-1, hlm. 181

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Data primer adalah sumber pertama dimana sebuah data dihasilkan.¹¹
Maka sumber data diperoleh dari obyek penelitian lapangan yang dilakukan di Desa pangkalan kapas, yaitu Masyarakat yang melakukan sistem akad *Musaqah* petani karet di Desa Pangkalan Kapas.
- b. Data sekunder adalah sumber data kedua sesudah sumber data primer. Misalnya dalam bentuk tabel-tabel atau diagram atau data yang diperoleh melalui laporan-laporan atau dokumen yang berkaitan dengan penelitian

5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data yang diperlukan, maka penulis menggunakan dengan cara sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi secara luas, observasi atau pengamatan berarti setiap kegiatan untuk melakukan pengukuran. Akan tetapi, observasi atau pengamatan disini diartikan lebih sempit, yaitu pengamatan dengan menggunakan indera penglihatan yang berarti tidak mengajukan pertanyaan-pertanyaan.¹²

b. Wawancara

Wawancara yaitu pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan

¹¹ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*, (Jakarta: Kencana, 2013), cet. ke-1, hlm. 129

¹² Dr. Irawan Soehartono, *Metode Penelitian Sosial*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008), cet. ke-5, hlm. 69

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

secara langsung oleh pewawancara (peneliti) kepada responden, dan jawaban-jawaban responden dicatat atau direkam dengan alat perekam.

c. Dokumentasi

Studi dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan kepada subjek penelitian. Dokumen yang diteliti dapat berupa berbagai macam, tidak hanya dokumentasi resmi.¹³

6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang telah diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lain sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.¹⁴

Teknis analisis data yang penulis lakukan yaitu pengelolaan data penelitian ini dari hasil wawancara, dokumentasi, dan kepustakaan dengan menggunakan pola deskriptif kualitatif analisis, yakni penulis mencoba memaparkan semua data dan informasi yang diperoleh kemudian menganalisa data dengan berpedoman dengan sumber-sumber tertulis. Kemudian penjelasan itu disimpulkan secara deduktif adalah menarik kesimpulan dari pertanyaan-pertanyaan yang bersifat umum kepada yang bersifat khusus sehingga penelitian ini dapat dengan mudah dimengerti.

¹³ *Ibid*, hlm. 70

¹⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, (Bandung: CV Alfabeta, 2009), cet. ke-6, hlm. 244

H. Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh kemudahan dalam penelitian ini penulis mengklasifikasi penelitian ini dalam beberapa bab dan setiap bab terdiri dari beberapa sub bagian, yaitu:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini mencakup latar belakang, batasan dan rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang kajian wilayah di Desa Pangkalan Kapas Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar, Gambaran umum Desa Pangkalan Kapas, bagian ini menggambarkan historis dan keadaan geografis di Desa Pangkalan Kapas, keadaan penduduk, ekonomi, kondisi pendidikan, dan kehidupan sosial keagamaan.

BAB III : LANDASAN TEORI

Dalam bab ini penulis menguraikan tentang Pengertian akad, rukun dan syarat akad dan implementasi akad. Dan pengertian dari *Musaqah*, Dalil *Musaqah*, Rukun *Musaqah*, Syarat *Musaqah*, ulama- ulama yang membolehkan *Musaqah*, yang membatalkan *Musaqah*, serta hikmah *Musaqah*

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan membahas tentang bagaimana sistem pelaksanaan akad *Musaqah* antara pemilik kebun karet dan penyadap di Desa Pangkalan Kapas Kecamatan Kampar Kiri hulu Kabupaten Kampar, dan *Musaqah* antara pemilik kebun karet dan penyadap karet di Desa Pangkalan Kapas Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar di tinjau dari *Fiqh* Muamalah

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran. Pada bab ini juga berisi kesimpulan dari hasil penelitian serta saran-saran yang diperlukan dalam upaya kesempurnaan. Selanjutnya diikuti oleh daftar pustaka dan juga beberapa lampiran dalam upaya kesempurnaan.

DAFTAR PUSTAKA

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Desa Dan Letak Geografis Desa

Pangkalan Kapas adalah sebuah desa di Kecamatan Kampar Kiri Hulu yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Lima Puluh Kota Provinsi Sumatera Barat dengan luas wilayah ± 4075 Ha. Penduduk etnis adalah 98 Suku Melayu Kampar Kiri dan 2 Suku Minang, Wilayah desa berada ditepi aliran sungai Batang Kapas dengan Sungai Batang Bio, desa ini merupakan daerah terisolir dimana jalur transportasi masyarakat untuk membeli kebutuhan pokok melalui dua jalur :

1. Dusun Pangkalan Kapas dan Dusun Batang Kapas untuk membeli kebutuhan pokok melalui transportasi sungai menggunakan sampan/mesin robin menuju ibu kecamatan/Gema dengan jarak tempuh 5-6 jam perjalanan.
2. Dusun Kampung Dalam dan Dusun Suka Menanti untuk membeli kebutuhan pokok melalui transportasi darat yaitu jalan tanah yang melewati perbukitan terjal menuju ibu kecamatan Kampar Kiri/Lipat Kain dengan jarak tempuh ± 75 Km lama perjalanan 6-7 jam, atau ke Payahkumbuh Provinsi Sumatera Barat dengan Jarak tempuh ± 30 Km lama perjalanan 3-4 Jam.

Berdasarkan sejarah Desa Pangkalan Kapas diperkirakan sudah ada dari tahun 1925 ini ditandai dengan adanya pemakaman keramat Bukit Kocik di

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dusun Pangkalan Kapas menurut keterangan tokoh masyarakat jauh sebelum kemerdekaan sudah ada pemukiman tersebut. Adapun asal mula penduduk yang pertama kali menepati daerah ini adalah: dua orang datuk dari keturunan kerajaan Pagaruyung/Sumatera Barat, yakni: Datuk Rajo Adil dan Datuk Sirah Manggau dari Luak Lima Puluh, di antaranya ada yang membawa biji kapas. Sesampai di sungai Batang Bio, kedua Orang Datuk tersebut sepakat untuk berpisah Jalan. Datuk Sirah Manggau turun ke hulu air Batang Kapas lalu membuka lahan untuk dijadikan kampung tepatnya di wilayah Desa Lubuk Bigau sekarang lalu menanam biji kapas yang dibawahnya.

Sedangkan Datuk Rajo Adil turun menelusuri sungai Bio dan tepatnya di Pangkalan Tuo dia membuka lahan untuk dijadikan kampung. Datuk Rajo Adil Kembali menelusuri sungai dengan menggunakan rakit kayu sebagai sampan dan sampailah dia di muara pertemuan sungai Batang Kapas, Datuk Rajo Adil berjumpa puntung kayu api yang diikatkan kapas, karena penasaran dia lalu dia menelusuri sungai Batang Kapas dan sesampainya di sungai lompatan bertemulah dengan Datuk Sirah Manggau yang sedang melompat dari batu satu ke batu lain untuk melepaskan puntung kayu api yang diikatkan kapas. Keterangan ini kami dapat dari tokoh Masyarakat Pangkalan Kapas, Datuk Mangkuto Suwar dan Datuk Sakkawi, Menurut Informasi Datuk Rajo Manggau melompat dari batu satu ke batu lain sebelah Kanan anak Sungai sedangkan Datuk Rajo Adil melompat dari batu satu ke batu lain sebelah kiri anak sungai. Makanya hutan yang ada di keegerian Pangkalan Kapas yang punya ulayat hanya dua orang Datuk yakni:

1. Datuk Rajo Adil yang sekarang dikenal Suku Datuk Jalano punya hutan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ulayat di sebelah kiri sungai Batang Bio

2. Datuk Sirah Manggau sekarang dikenal Suku datuk Manggun punya hutan

Ulayat di sebelah kanan sungai Batang Kapas.

Akhir cerita kedua orang Datuk hilirlah ke muara sungai Batang kapas

sempai dimuara sungai Batang Kapas lalu berhenti untuk beristirahat dan akhirnya sepakat membuka lahan untuk dijadikan kampung sehingga kampung tersebut dinamai: Pangkalan Kapas, Pangkalan yang maknanya: *Persinggahan* sedangkan Kapas maknanya: pertanda sudah ada perkampungan di hulu sungai Batang Kapas, yang sekarang sudah menjadi Desa Lubuk Bigau. Desa Pangkalan Kapas adalah bagian dari wilayah kerajaan Gunung Sahilan yang pusat pemerintahan dibawah Kekhalifahan Ludai, yang wilayah kekuasaanya meliputi:

1. Ikua Koto : Kenegerian Koto Lamo.
2. Kapalo Koto : Kenegerian Pangkalan Kapas.

Maka sekitar pada tahun 1970 sistem kerajaan dihapuskan. Pada tahun 1978 Desa Pangkalan Kapas memisahkan dari Kekhalifahan Ludai lalu membuat desa persiapan yang dinamakan desa Desa Muda. Pada awal berdiri desa Kepala Desa masih dijabat oleh Wali Kampung M. Sabar kemudian desa terus berkembang dengan pesat, adapun Wilayah Kenegerian Pangkalan Kapas meliputi:¹⁵

1. Dusun Pangkalan Kapas
2. Dusun Kebun Tinggi
3. Dusun Selasung

¹⁵ Harlis, Kepala Desa Pangkalan Kapas, Wawancara: 08 Januari 2020)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

4. Dusun Lubuk Bigau
5. Dusun Kampung Dalam

Pada awal mendirikan desa, Kenegarian Pangkalan Kapas terjadi krisis kepercayaan kepada Wali Kampung, di mana awalnya masyarakat hidup dalam penuh kerukunan dan kekeluargaan berubah menjadi konflik antar kelompok, karena Ibu Kedesaan tidak sesuai dengan keinginan semula mendirikan desa yang Ibu Kedesannya berkedudukan di Pangkalan Kapas berubah Ibu Kedesaan di Kebun Tinggi. Maka setelah Kebun tinggi menjadi desa, para tokoh masyarakat yang ada di Pangkalan Kapas mengusulkan desa persiapan pada Tahun 1978 akhirnya Kenegerian Pangkalan Kapas resmi menjadi desa defenitif yaitu Desa Pangkalan Kapas, kepala desa pertama dijabat oleh M. Kasim (tahun 1978-1985) dan Sekdes Guru Ramaini. Pada tahun 1980 terjadi pergantian Sekdes kepada Darmansi pada Tahun 1985 M. Kasim mengundurkan diri sebagai kepala desa dan diganti oleh Darmansi (Tahun 1986-1990) dan Sekdes Datuk Jindo Amat. Pada Tahun 1990 Darmansi mengundurkan diri dan diganti oleh Datuk Jindo Amat sebagai PJ.Kepala Desa (Tahun 1991-1994) dan Sekdes Afrizon.

Pada tahun 1994 Jabatan Kepala desa baru dipilih langsung oleh masyarakat. Pejabat Kepala Desa hasil pemilihan sebagai berikut :

Proode I: (Tahun 1994-2000) Kepala Desa Samsul Bahri. Jabatan Sekdes terjadi tiga kali pergantian dari Busmaini, kepada Damrisman, pada Tahun 2000 Kepala Desa dinonaktifkan oleh Bupati Kampar dan ditujuk selaku PJ.Kepala Desa Camat Kampar Kiri Hulu Drs. Munir. Pada Tahun 2001-2002 Samsul Bahri diaktifkan lagi menjadi Kepala Desa

dan terjadi pergantian Sekdes dari Damrisman kepada Ruswandi.

Priode II : (Tahun 2002-2007) Kepala Desa Afrizon Sekdes Suardi.

Priode III: (Tahun 2007-2013) Kepala Desa Damhasmur Sekdes Suardi.

Priode IV: (Tahun 2014-2019) Kepala Desa Harlis, SE Sekdes Damsir) Priode V:
(Tahun 2020-Sekarang) Kepala Desa Harlis, SE Sekdes Suardi, S.Sos)

B. Jumlah Penduduk Desa Pangkalan Kapas

Pada dasarnya keadaan Desa Pangkalan Kapas adalah masyarakat yang mempunyai ragam suku, budaya dan ragam kesenian dari daerah lain maupun yang berasal dari Desa Pangkalan Kapas itu sendiri. Adapun jumlah penduduk Desa Pangkalan Kapas hingga saat ini dapat digolongkan pada jumlah penduduk yang sedikit, apabila disesuaikan dengan jumlah sebanyak 90 KK (Kepala Keluarga) atau 340 jiwa. Yang terdiri dari laki laki dan perempuan. Dan laki laki berjumlah 177 jiwa dan yang perempuan berjumlah 163 jiwa

Tabel 2.1
Jumlah Penduduk Desa Pangkalan Kapas Dilihat
Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Kepala keluarga	90 KK
2	Laki-laki	177 Jiwa
3	Perempuan	163 Jiwa
Jumlah		340 Jiwa

Sumber: Monografi Desa Pangkalan Kapas 08 Januari 2020.

Berdasarkan tabel diatas jumlah penduduk Desa Pangkalan Kapas tahun 2020 berjumlah 340 jiwa, sedangkan sensus penduduk tahun 2019 secara keseluruhan belum dapat dipastikan jumlahnya, dari jumlah tersebut diatas dibagi beberapa golongan yang tertera pada tabel diatas.¹⁶

¹⁶ Suardi, Sekretaris Desa Pangkalan Kapas, Wawancara: 08 Januari 2020)

C. Keadaan Sosial

Kondisi pendidikan dan ekonomi masyarakat Desa Pangkalan Kapas pendidikan bagi masyarakat Desa Pangkalan Kapas Kecamatan Kampar Kiri Hulu merupakan salah satu aspek yang berperan penting dalam meningkatkan kualitas hidup manusia dalam mencapai kehidupan yang sempurna baik kehidupan di dunia maupun di akhirat, serta bagi dirinya dan bagi orang lain, dan juga kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pendidikan sangat berpengaruh terhadap kemajuan masyarakat di Desa Pangkalan Kapas. melihat kondisi sekarang keadaan pendidikan Desa Pangkalan Kapas dapat dikatakan cukup baik. Hal itu dapat dikatakan karena sudah banyaknya lembaga lembaga pendidikan yang berdiri di desa tersebut dan banyaknya jumlah masyarakat yang telah menyelesaikan pendidikannya baik di sekolah maupun di perguruan tinggi. Untuk lebih jelasnya mengenai pendidikan masyarakat Desa Pangkalan Kapas dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.2
Pendidikan Masyarakat Desa Pangkalan Kapas

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	SD/ MI	170 Jiwa
2	SLTP/ MTs	58 Jiwa
3	SLTA/ MA	31 Jiwa
4	S1/ Diploma	22 Jiwa
5	Putus Sekolah	40 Jiwa
6	Buta Huruf	20 Jiwa

Adapun kondisi pendidikan masyarakat Desa Pangkalan Kapas hingga tahun 2020 seperti tabel 2.2 diatas, menunjukan bahwa tingkat pendidikan dapat dikatakan sudah cukup maju. Pada masyarakat Desa Pangkalan Kapas Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar karena hal ini termasuk persoalan yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State of the University of Sultan Saifur Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sangat penting. Hal ini terbukti bahwa masyarakat yang belum sekolah berjumlah atau tidak pernah sekolah mencapai 40 Jiwa, sedangkan tingkat pendidikan SD sederajat berjumlah 170 Jiwa, tingkat MTs atau sederajat berjumlah 58 Jiwa, tingkat MA atau sederajat berjumlah 31 jiwa, sedangkan dalam tingkat perguruan tinggi (S1) berjumlah 22 jiwa. Masyarakat Desa Pangakalan Kapas melanjutkan pendidikan putra putrinya dengan berbagai cara, misalnya ada yang melanjutkan jenjang pendidikan formal dan non formal. Adapun bagi masyarakat tersebut jika ingin melanjutkan pendidikan formalnya seperti sekolah lanjutan tingkat menengah atas (SMA) Harus melanjutkan di desa lain begitu juga dengan melanjutkan pendidikan S1 bisa melanjutkan di Universitas yang berada di kota. Adapun bagi mereka yang ingin melanjutkan pendidikan non formalnya bisa melanjutkan di daerah atau di kota seperti kursus menjahit, kursus salon atau kursus komputer. Pendidikan formal dan non formal pada masyarakat Desa Pangakalan Kapas pada saat ini sudah cukup maju. Masyarakat Desa Pangakalan Kapas (para orang tua) sudah banyak mengerti pentingnya pendidikan bagi putra putrinya untuk meneruskan pendidikan non formal dan formal.

Pada zaman dahulu rendahnya pendidikan di Desa Pangakalan Kapas, karena kurangnya perhatian dan motivasi dari orang tua untuk menyekolahkan anaknya, kurang mendukungnya keadaan ekonomi masyarakat karena pendapatan masih rendah, serta masih rendahnya cara berfikir orang tua dalam memandang pentingnya pendidikan formal. Oleh karena itu, masyarakat Desa Pangakalan Kapas tingkat pendidikannya yang hanya sebatas tingkat SD atau SMP bahkan tidak menyelesaikan pendidikannya sama sekali.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dilihat dari sarana dan prasarana pendidikan formal di Desa Pangakalan Kapas, dapat dikatakan cukup mendukung dalam upaya meningkatkan pendidikan masyarakat Desa Pangakalan Kapas tersebut. Hal ini didasari pada data dokumentasi yang ada pada pihak pemerintah desa tersebut yang didalamnya tercatat beberapa lembaga pendidikan yaitu PAUD, MI, SD. Disamping itu juga tercatat lembaga pendidikan tingkat menengah atas, yakni SMP Satu Atap yang berada di Desa Kebun Tinggi saja, Hanya saja SMK, SMA, MA, dan perguruan tinggi yang belum ada di daerah tersebut, sehingga apabila ingin melanjutkan ke SMK, SMA, MA, dan perguruan tinggi harus melanjutkan ke desa lain atau ke kota misalnya Kota Pekanbaru, Kota Bukittinggi (Sumatera Barat) atau ke kota lainnya. Demikian pula, mengenai pendidikan non formal pada masyarakat Desa Pangakalan Kapas tercatat sudah ada, wirid ibu-ibu, pengajian-pengajian ibu-ibu dan anak anak.

Sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya, sebagian besar masyarakat Desa Pangakalan Kapas adalah bertani. Oleh karena itu perekonomian masyarakat desa ini dapat dikatakan tergolong ekonomi rendah dan menengah. Faktor pendidikan mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan seseorang atau kehidupan bermasyarakat secara keseluruhan. Artinya faktor pendidikan merupakan salah satu aspek penunjang kesejahteraan hidup seseorang baik kehidupan di dunia maupun di akhirat.

Dengan demikian apabila seseorang memiliki pengetahuan yang cukup tinggi akan timbul kondisi yang baik pula didalam memenuhi kebutuhan hidup agar dapat tercapai kesejahteraan dan kebahagiaan dengan yang memiliki tingkat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

pendidikan yang relatif rendah atau mereka yang tidak pernah mengenyam pendidikan sama sekali. Di samping itu, sebagian masyarakat bermata pencaharian sebagai petani karet, pedagang, pegawai negeri sipil dan sebagiannya, seperti yang tercantum pada tabel berikut:

Tabel 2.3
Sumber Penghasilan Masyarakat Desa Pangkalan Kapas

No	Mata Pencarian	Jumlah
1	Petani	246 Jiwa
2	Pedagang	4 Jiwa
3	PNS	5 Jiwa
4	Bidan/Perawat	1 Jiwa
5	Guru	8 Jiwa
6	Tukang	6 Jiwa
7	Swasta	10 Jiwa

Sumber: Monografi Desa Pangkalan Kapas 2019, 08 Januari 2020

Dari tabel di atas mengenai sumber penghasilan atau mata pencaharian masyarakat Desa Pangkalan Kapas dapat dikatakan mayoritas petani karet dan merupakan mata pencaharian utama Desa Pangkalan Kapas, ini dapat dilihat dari jumlah masyarakatnya yang hidup bertani dengan bermacam bentuk, seperti menggarap tanah sendiri, menggarap tanah milik orang lain, yaitu menyadap karet dengan jalan bagi hasil. Sedangkan bagi hasil yang diperoleh petani upahan atau yang mengolah sendiri rata-rata antara Rp.1.500.000 sampai dengan Rp. 3.000.000 perbulan.

Pekerjaan lain yang menjadi sumber mata pencaharian masyarakat Desa Pangkalan Kapas adalah berdagang, guru, dan ada juga yang bekerja sebagai pegawai dan lain-lain. Dengan tahap kehidupan inilah masyarakat Desa Pangkalan Kapas menghabiskan waktu mereka. Berkebun karet tampaknya menjadi penunjang utama guna memenuhi kehidupan ekonomi masyarakat Desa Pangkalan Kapas, apabila terjadi perselisihan diantara masyarakat Desa Pangkalan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kapas maka penyelesaiannya dilakukan dengan musyawarah keluarga dan tidak pernah masalah tersebut sampai ke pejabat yang berwenang. Sedangkan masyarakat yang belum bekerja yaitu terdiri dari usia anak-anak, usia remaja, maupun golongan dewasa yang belum mendapatkan pekerjaan.¹⁷

a. Kondisi Sosial Keagamaan Masyarakat Desa Pangkalan Kapas

Penduduk Desa Pangkalan Kapas dalam segi agama yaitu 100% mayoritas memeluk agama Islam, dalam kehidupan beragama di Desa Pangkalan Kapas yang ada cukup baik, hal ini dapat dibuktikan dalam sehari-harinya yaitu dengan ketaatannya dengan menjalankan kegiatan keagamaan. Hal ini dapat dibuktikan dengan kegiatan keagamaan pengajian zikir ibu-ibu, marhabanan, yasinan dan tahlil serta shalat, puasa dan ibadah-ibadah lainnya.

Kegiatan keagamaan pada masyarakat Desa Pangkalan Kapas sudah berjalan dengan baik. Hal ini terlihat pada tabel diatas, bahwa aktivitas para remaja dan dewasa sudah memadai. Kegiatan para ibu-ibu yang dilaksanakan di rumah-rumah warga yang dilaksanakan secara bergiliran dan dilaksanakan sekali dalam satu minggu yaitu setiap Hari Jum'at.. Kegiatan ini dilaksanakan oleh masyarakat dilaksanakan secara rutinitas mereka setiap minggu sesuai dengan jadwal mereka. Pemerintahan Desa Pangkalan kapas bekerja sama dengan pemerintahan Kabupaten Kampar telah mengantisipasi hal ini dengan cara membuat sarana dan prasarana dibidang peribadatan, seperti membangun masjid dan mushalla. Data sarana dan prasarana peribadatan masyarakat Desa Pangkalan kapas dapat dilihat pada tabel berikut:

¹⁷ Suardi, Sekretaris Desa Pangkalan Kapas, Wawancara: 08 Januari 2020)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Tabel 2.4

Jumlah sarana Peribadatan Masyarakat Desa Pangkalan Kapas

No	Sarana Peribadatan	Jumlah
1	Masjid	1
2	Mushalla	1

Sumber: Dialog dari data lapangan, tanggal 08 Januari 2020

Di Desa Pangkalan Kapas sampai dengan sekarang ini masyarakatnya hidup dalam suasana yang penuh dengan kekeluargaan. Mereka sangat erat antara satu dengan yang lainnya. Mereka hidup bergotong royong, mereka selalu hidup rukun dan damai. Hal ini berkat usaha bersama antara para tokoh masyarakat dan tokoh agama setempat dalam hal menerapkan pentingnya rasa saling menghargai antara pemeluk agama yang satu dengan yang lain. Masyarakat Desa Pangkalan Kapas sekarang telah memiliki fasilitas pendukung dalam hal peribadatan. Hal ini dapat dilihat pada tabel diatas, masyarakat Desa Pangkalan Kapas memiliki satu masjid dan satu mushalla.

Walaupun kehidupan masyarakat Desa Pangkalan Kapas berjalan dengan baik, namun menurut Bapak Yuzar (wawancara pada tanggal 06 Januari 2020), tingkat pemahaman masyarakat Desa Pangkalan Kapas terhadap ajaran agama Islam belum cukup memadai atau memahami. Hal ini terlihat dari masih banyaknya hal-hal tertentu dalam ajaran Islam yang belum dipahami dan dimengerti sama sekali oleh masyarakatnya, sehingga apa yang mereka dapatkan tidak diamalkan.

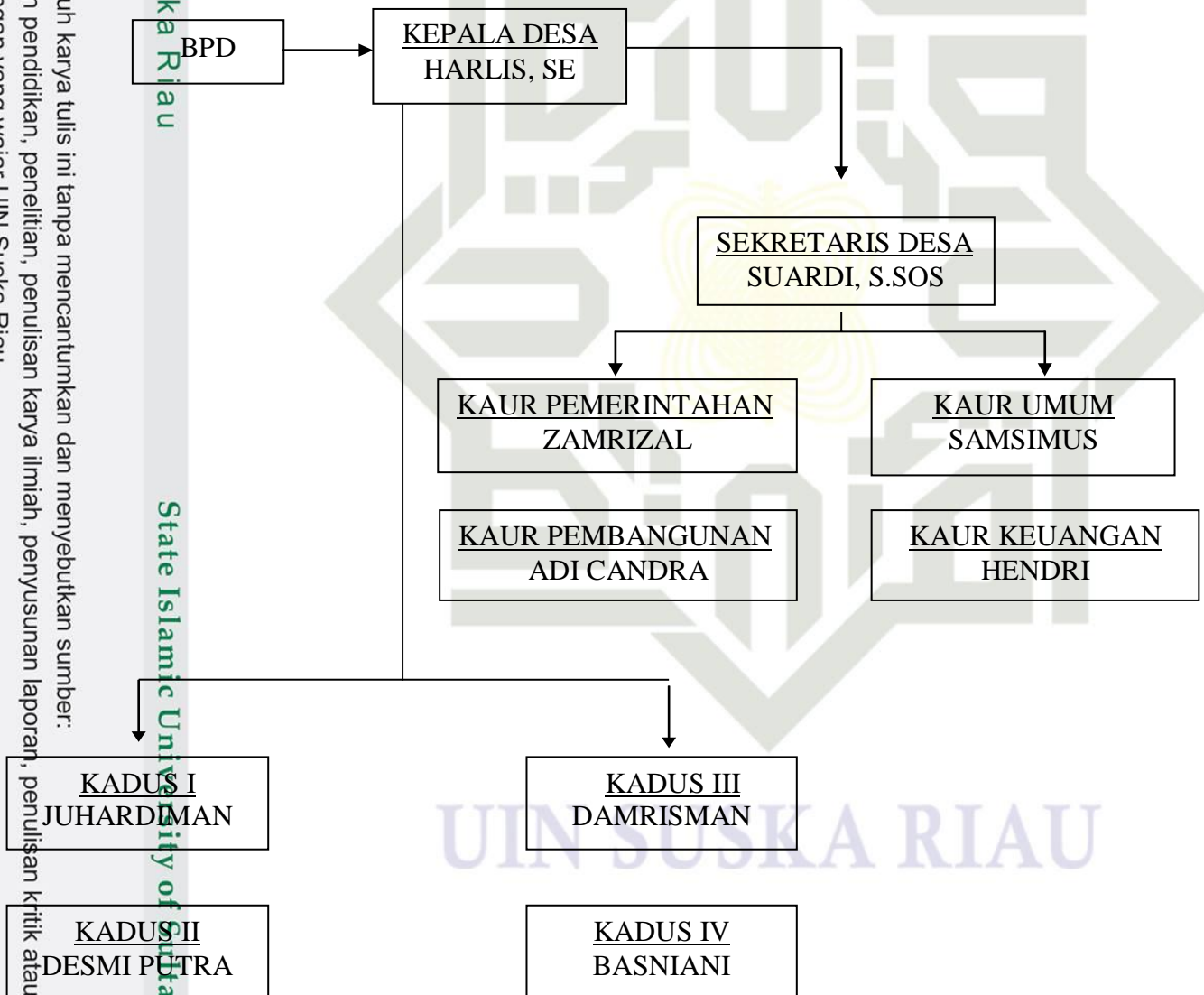
Dari uraian diatas, gambaran umum Desa Pangkalan Kapas Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar Provinsi Riau. Menunjukkan bahwa kehidupan masyarakat Desa Pangkalan Kapas tersebut secara umum sudah cukup maju. Hanya saja dikernakan letak Desa Pangkalan Kapas ini jauh dari kecamatan, kabupaten/kota dan keterbatasan alat komunikasi karena tidak ada

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

aringan di Desa Pangkalan Kapas dan infastruktur atau alat transportasi yang tidak mendukung sehingga sulit untuk menempuhnya. Namun dalam hal ini tidak menutup kemungkinan masyarakat Desa Pangkalan Kapas untuk mudah dapat mengikuti perkembangan dan kemajuan berfikir seperti masyarakat kota.¹⁸

STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAHAN DESA PANGKALAN KAPAS KECAMATAN KAMPAR KIRI HULU KABUPATEN KAMPAR PERIODE 2020-2025



¹⁸ Yuzar, Ninik Mamak Desa Pangkalan Kapas, *Wawancara*: 06 Januari 2020)

BAB III

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Akad (Perjanjian)

Kata *Akad* berasal dari Bahasa Arab عَقْدَ yang berarti perjanjian, ikatan yang kokoh. Maka makna kata berkaitan juga dengan akidah karena mempunyai akar kata dan akibat hukum yang sama. Akad adalah ikatan yang menimbulkan hubungan yang kokoh antara dua pihak, mengakibatkan *iltizam* (hukum perikatan) serta melahirkan hak dan kewajiban.

Pengertian akad menurut pasal 20 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan hukum.¹⁹

Makna khusus akad yaitu *ijab* dan *qabul* yang melahirkan *hak* dan *tanggung jawab terhadap objek akad (ma'qud 'alaih)*. Makna khusus ini ang dipilih oleh Hanafiah. Pada umumnya, setiap istilah akad itu berarti *ijab qabul* (seah terima) kecuali ada dalil yang menunjukkan makna lain.

Sedangkan makna umum akad *adalah setiap perilaku yang melahirkan hak, atau mengalihkan atau mengubah atau mengakhiri hak, baik itu bersumber dari satu pihak ataupun dua pihak*. Definisi diatas adalah definisi akad menurut Malikiyah, Safi'iyah dan Hanabilah. Istilah akad ini sinonim dengan istilah *iltizam* (kewajiban).²⁰

¹⁹ Prof. Dr. H. Akhmad Mujahidin, M.Ag. *Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016) cet. ke-1 hlm 3-4"

²⁰ Dr. Oni Sahroni, MA Dan Dr. M. Hasanuddin, M.Ag. *Fiqih Muamalah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016) Cet ke-1 hlm 4

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

Dalam menjalankan bisnis, satu hal yang sangat penting adalah masalah akad (perjanjian). Akad sebagai salah satu cara untuk memperoleh harta dalam syariat Islam yang banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari.

Akad merupakan cara yang diridhai Allah dan harus ditegakkan isinya seperti yang tercantum dalam Al-Quran surat Al-Maidah (5): 1

Menyebutkan:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوفُوا بِالْعُقُودِ

“Hai orang-orang yang beriman, Penuhilah akad-akad itu”.

Kata “akad” berasal dari bahasa Arab *al-aqdu* dalam bentuk jamak disebut *al-uquud* yang berarti ikatan atau simpul tali. Menurut para ulama fiqh, kata akad didefinisikan sebagai hubungan antara *ijab* dan *qabul* sesuai dengan kehendak syariat yang menetapkan adanya pengaruh (akibat) hukum dalam objek perikatan.²¹

Ash-Shabuni menjelaskan, bahwa yang dimaksud dengan *al-uqud* dalam ayat ini adalah perjanjian antara Allah dan hamba-Nya yang berupa *taklip- taklip syar’iyyah* dan perjanjian di antara manusia berupa segala bentuk perikatan yang diperintahkan Allah kepada hamba-Nya, dan transaksi-transaksi lainnya. *Al-uqud* mencakup janji prasetia seorang hamba kepada Allah dan perjanjian yang dibuat oleh manusia dalam pergaulan dengan sesamanya.

Akad adalah pertalian antara *ijab* dengan *qabul* menurut ketentuan syara’ yang menimbulkan akibat hukum pada objeknya atau dengan redaksi yang lain, berkaitan antara pembicaraan salah seorang yang melakukan akad dengan

²¹ Dr Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2013) Cet ke-2 hlm 71

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang lainnya menurut syara' pada segi yang tampak pengaruhnya pada objek.²²

Dari definisi diatas dapat di jelaskan bahwa akad bagi hasil adalah suatu perjanjian atau ikatan yang terjadi antara kedua belah pihak, yang satu menyatakan *ijab* dan yang kedua menyatakan *qabul*, yang kemudian menimbulkan sebuah akibat-akibat hukum, yaitu timbulnya hak dan kewajiban antara kedua pihak tersebut. Selain itu juga akad bagi hasil dapat diartikan dengan bagi hasil dalam bidang perkebunan.

B. Rukun-Rukun Dan Syarat-Syarat Akad (Perjanjian)

1. Rukun-Rukun Akad

Rukun-Rukun Akad Adalah sebagai berikut:

a. Orang yang berakad ('aqid)

Orang/pelaku akad, yaitu para pihak yang melakukan akad, contohnya penjual dan pembeli, penyewa dan yang menyewakan, karyawan dan majikan, shahibul maal dan mudharib, mitra dengan mitra dalam musyarakah, dan sebagai nya. Pihak yang melakukan akad harus memenuhi syarat, yaitu orang yang merdeka, mukalaf, dan orang yang berakal sehat.

b. Objek Akad/Sesuatu yang Diakadkan (*Ma'qud alaih*)

Objek akad merupakan sebuah konsekuensi yang harus ada sebagai akibat dilakukannya suatu transaksi. Objek jual-beli adalah barang dagangan. Objek *mudharabah* dan *musyarakah* adalah modal dan kerja. Objek sewa menyewa adalah manfaat atas barang yang

²² Ahmad Wardi Muslich. *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Penerbit Amzah 2003), hlm 110-111

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

disewakan dan seterusnya.

c. *Shigat*, yaitu *Ijab Qabul*

Shigat, yaitu *Ijab Qabul* adalah pernyataan untuk mengikatkan diri. *Shigat* merupakan kesepakatan dari para pelaku dan menunjukan mereka saling ridha. Tidak sah suatu transaksi apabila ada salah satu pihak yang terpaksa melakukannya, berdasarkan firman Allah SWT.

QS. An-Nisa (4): 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”

Dengan demikian, apabila terdapat penipuan (*tadlis*), paksaan (*ikhrah*) atau ketidaksesuaian objek akad, maka akad dapat menjadi batal walaupun *ijab qabul* telah dilaksanakan karena semua hal tersebut dapat menimbulkan ketidakrelaan salah satu pihak.²³

2. Syarat-syarat Akad.

Setiap akad mempunyai syarat yang ditentukan *syara'* yang disempurnakan. Syarat-syarat terjadinya akad ada dua macam:

²³ Dr. Neneng Hurhasanah, Dra., M. Hum. *Mudharabah Dalam Teori Dan Praktik* (Bandung: Pt Refika Aditama, 2015), cet. ke-1. Hlm 49-50

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Syarat-syarat yang bersifat umum, yaitu syarat-syarat wajib sempurna wujudnya dalam berbagai akad. Syarat umum yang harus dipenuhi dalam berbagai macam akad sebagai berikut:
 - 1) Kedua orang yang melakukan akad cakap bertindak (ahli). Tidak sah akad orang yang tidak cakap bertindak, seperti orang gila, orang yang berada di bawah pengampunan (*mahjur*), dan arena boros.
 - 2) Yang dijadikan objek akad dapat menerima hukumnya.
 - 3) Akad itu diizinkan oleh *syara'*, dilakukan oleh orang yang mempunyai hak melakukannya, walaupun dia bukan *'aqid* orang yang memiliki barang.
 - 4) Janganlah akad itu akad yang dilarang *syara'*, seperti jual beli *mulasamah* (saling merasakan).
 - 5) Akad dapat memberikan faedah, sehingga tidaklah sah bila *rhan* (gadai) dianggap sebagai imbalan amanah (kepercayaan).
 - 6) *Ijab* itu berjalan terus, tidak dicabut sebelum terjadi *qabul*. Maka apabila orang yang berijab menarik kembali ijabnya sebelum qabul maka batallah ijabnya.
 - 7) *Ijab* dan *qabul* mesti bersambung, sehingga apabila seseorang yang berijab telah berpisah sebelum adanya qabul, maka ijab tersebut menjadi batal.
- b. Syarat-syarat yang bersifat khusus, yaitu syarat-syarat yang wujudnya wajib ada dalam sebagian akad. Syarat khusus ini dapat juga disebut *syarat idhafi* (tambahan) yang harus ada di samping syarat-syarat yang umum, seperti syarat adanya saksi dalam pernikahan.²⁴

²⁴ Prof. Dr. H. Abdul Rahman Ghazaly, M.A dan Drs. H. Ghufroon Ihsan, M.A. *Fiqih*

C. Implikasi Akad

Setiap akad yang dibentuk oleh pihak yang melakukan transaksi, memiliki tujuan dasar yang ingin diwujudkannya. Seperti perpindahan kepemilikan dalam akad jual beli, kepemilikan mamfaat bagi penyewa dalam akad *ijarah* (sewa), hak untuk menahan barang dalam akad *rahn*, dan lainnya. Dengan terbentuknya akad, akan muncul hak dan kewajiban di antara pihak yang bertransaksi. Dalam jual beli misalnya, pembeli berkewajiban untuk menyerahkan uang sebagai harga atas objek transaksi dan berhak mendapatkan barang. Sedangkan bagi penjual berkewajiban untuk menyerahkan barang dan berhak menerima uang sebagai kompensasi barang.²⁵

D. Bagi Hasil Menurut Hukum Islam

1. Sistem bagi hasil

Sistem Bagi Hasil biasa terjadi pada masyarakat yang melakukan nakok karet, Nakok sendiri merupakan bahasa yang sering di gunakan oleh masyarakat Desa Pangakalan Kapas, khususnya dalam bidang perkebunan karet. Sedangkan bagi hasil ialah perjanjian pengolahan tanah, dengan upah sebagian dari hasil yang diperoleh dari pengolahan tanah itu.²⁶ Bagi hasil juga merupakan bentuk dari bagi hasil yang banyak dilakukan oleh sebagian orang di suatu pedesaan pada perkebunan karet, khususnya di

Muamalah (Jakarta: PrenadaMedia Group, 2018). Cet. ke-5. Hlm 54-55

²⁵ DimyauddinDjuwaini. *PengantarFiqihMuamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010). Cet. ke-2. Hlm 64-65

²⁶ Chairuman Pasaribu K. Lubis. *Hukum Perjanjian dalam Islam*. (Jakarta: Sinar Grafika, 1996) hlm. 61

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Desa Pangkalan Kapas yang merupakan tempat penulis untuk melakukan penelitian. Kata-kata nakok sudah terdengar tidak asing bagi sebagian penduduk pedesaan yang desanya memiliki mata pencarian perkebunan karet atau pertanian.

Adapun sistem bagi hasil yang dimaksud adalah cara pembagian hasil pada perkebunan karet yang dilakukan dengan pembagian seperti $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{3}$, dan $\frac{1}{5}$. Sistem bagi hasil ini merupakan istilah lain dari *Musaqah*, *Muzara'ah*, dan *mukhabarah* dalam hukum Islam. Menurut Imam Dawud yang boleh di *Musaqahkan* hanyalah kurma namun menurut Imam Malik *Musaqah* di bolehkan untuk semua pohon yang memiliki akar yang kuat.²⁷

Sistem bagi hasil dalam bentuk nakok yang dilakukan oleh masyarakat pedesaan umumnya dilakukan dengan disetujuinya perjanjian bagi hasil yang mana perjanjian bagi hasil tersebut hanya berupa perjanjian secara lisan (kata-kata) yang diucapkan oleh kedua belah pihak (pemilik kebun karet dan penyadap).

Sistem bagi hasil dalam bentuk nakok kebun karet dalam syariat Islam, sebagaimana dibahas dalam kitab-kitab *fiqh*, dilakukan dengan beberapa macam cara yang dikenal dengan istilah *Musaqah*, *Muzara'ah*, dan *mukhabarah* atau *Qiradh* (bagi hasil). Yang mana ketiga cara tersebut merupakan akad atau transaksi muamalah Islam dalam bidang pengelolaan dan pemanfaatan tanah/lahan.

²⁷ Suhendri Hendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm.149

2. Macam-Macam Bentuk Akad Dalam Bidang Pertanian

Dalam kajian hukum Islam banyak teori yang dipelajari, dalam bidang perekonomian, jual beli, dan bagi hasil. Dalam hal ini penulis akan membahas tentang sistem bagi hasil dalam bidang perkebunan atau pertanian dalam hukum Islam atau Fiqih Muamalah ada beberapa macam bentuk akad antara lain yaitu:

- a. Akad *Muzara'ah*
- b. Akad *Mukhabarah* atau *Qiradh* dan
- c. Akad *Musaqah*,

Muzara'ah adalah kerja sama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, di mana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada si penggarap untuk di tanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu (persentase) dari hasil panen, dan benihnya berasal dari pemilik kebun.²⁸

Antara *Muzara'ah* dan *Musaqah* terdapat persamaan dan perbedaan. Persamaannya ialah kedua-duanya merupakan akad (perjanjian) bagi hasil. Adapun perbedaannya ialah: di dalam *Musaqah* tanaman telah ada tetapi, memerlukan tenaga kerja untuk memeliharanya. Di dalam *muzara'ah*, tanaman di tanah belum ada, tanahnya masih harus digarab dahulu oleh penggarapnya.²⁹

Muzara'ah adalah suatu bentuk transaksi pengelolaan tanah dengan

²⁸ Muhammad Syafi'I Antonio. *Bank Syariah Dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 99

²⁹ Abdul Rahman Ghazaly, et, al, Op. Cit., hlm 115

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

upah diambil dari hasil pengelolaan tanah tersebut dan bibitnya dari yang punya tanah. Sedangkan *Mukhabarah* juga transaksi yang sama cuman bibitnya dari pekerja (pengelola).³⁰ Setelah diketahui definisi di atas, dapat dipahami bahwa *mukhabarah* dan *muzara'ah* ada kesamaan dan ada pula perbedaan. Persamaannya ialah antara *Mukhabarah* dan *Muzara'ah* terjadi pada peristiwa yang sama, yaitu pemilik tanah menyerahkan tanahnya kepada orang lain untuk dikelola. Perbedaannya ialah pada modal, bila modal berasal dari pengelola, disebut *Mukhabarah*, dan bila modal dikeluarkan dari pemilik tanah disebut *Muzara'ah*.³¹

Dari pengertian di atas dapat dijelaskan bahwa perbedaan antara akad *muzara'ah* dan *mukhabarah*, hanya terletak pada benih tanaman. Dalam *muzara'ah*, benih tanaman berasal dari pemilik tanah, sedangkan dalam *mukhabarah*, benih tanaman berasal dari pihak penggarap.³² Dalam hal ini penulis beranggapan bahwa sistem bagi hasil antara pemilik kebun karet dan penyadap tersebut merupakan bagi hasil dalam bidang memelihara perkebunan yang dalam fiqh muamalah yang disebut dengan istilah akad al-*Musaqah*.

3. Pengertian *Musaqah*

Musaqah dalam arti bahasa merupakan *wazn mufa'alah* dari kata *as-saqyu* yang sinonimnya *asy-syurbu*, artinya memberi minum. Penduduk

³⁰ Drs. H. A. Syafii jafri. *Fiqh Muamalah*, (Pekanbaru: Suska Press, 2008), Hlm 159

³¹ Dr. H. Hendi Suhendi, M.Si. *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: pt RajaGrafindo Persada, 2008), cet. ke-1 Hlm 155-156

³² Ibid., hlm 117

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Madinah menamai *Musaqah* dengan *muamalah*, yang merupakan *wazn mufa'alah* dari kata '*amila* yang berarti berkerja (bekerja sama). Menurut syara' *Musaqah* adalah suatu akad penyerahan pepohonan kepada orang yang mau menggarapnya dengan ketentuan hasil buah-buahan atau *getah-karet* dibagi di antara mereka berdua.³³

Musaqah diambil dari kata *as-saqa*, yaitu seseorang bekerja untuk mengelola pohon tamar atau mengurus anggur atau pohon-pohon yang lainnya supaya mendatangkan kemaslahatan dan mendapatkan bagian tertentu dari hasil yang diurus sebagai imbalan.

Menurut istilah Ahli Fiqih, Al-Jazairi mengemukakan defenisi yang dikemukakan oleh para ulama bahwa *al-Musaqah* adalah akad untuk pemeliharaan pohon kurma, tanaman (pertanian) dan hal yang lainnya, dengan syarat-syarat tertentu. Menurut Malikiyah, *al-Musaqah* ialah sesuatu yang tumbuh di tanah.

Menurut Malikiyah, sesuatu yang tumbuh di tanah terbagi menjadi lima macam, yaitu sebagai berikut:

- a. Pohon-pohon tersebut berakar kuat (tetap) dan berbuah. Buah itu di petik serta pohon tersebut tetap ada dengan waktu yang lama, misalnya pohon anggur dan zaitun.
- b. Pohon-pohon tersebut berakar tetap, tetapi tidak berbuah, seperti pohon kayu keras, karet dan jati
- c. Pohon-pohon tersebut tidak berakar kuat, tetapi berbuah dan dapat dipetik seperti padi.

³³ Ahmad Wardi Muslich, *et, al, Op. Cit.* Hlm. 404

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Pohon-pohon tersebut tidak berakar kuat dan tidak ada buahnya yang dapat dipetik, tetapi memiliki kembang yang bermamfaat seperti bunga mawar.
- e. Pohon-pohon yang diambil mamfaatnya bukan buahnya, seperti tanaman hias yang ditanam di halaman rumah dan di tempat lainnya.³⁴

Menurut Syafi'iyah, yang dimaksud *al-Musaqah* ialah, memberikan pekerjaan orang yang memiliki pohon tamar dan anggur kepada orang lain untuk kesenangan keduanya dengan menyiram, memelihara dan menjaganya dan pekerja memperoleh bagian tertentu dari buah yang dihasilkan pohon-pohon tersebut. Menurut Syaikh Syihab al-Din al-Qalyubi dan Syaikh Umairah, *al-Musaqah* ialah, mempekerjakan manusia untuk mengurus pohon dengan menyiram dan memeliharanya dan hasil yang dirizkikan Allah dari pohon itu untuk mereka berdua. Menurut Muhammad Syafi'i Antonio, *al-Musaqah* adalah bentuk yang lebih sederhana dari *muzara'ah*, di mana si penggarap hanya bertanggung jawab atas penyiraman dan pemeliharaan. Sebagai imbalan si penggarap berhak atas *nishab* tertentu dari hasil panen.³⁵

Dengan demikian, akad *al-Musaqah* adalah sebuah bentuk kerjasama pemilik kebun dengan petani penggarap dengan tujuan agar kebun itu dipelihara dan dirawat sehingga memberikan hasil yang maksimal. Kemudian segala sesuatu yang dihasilkan pihak keduanya berupa buah

³⁴ Prof. Dr. H. Ismail Nawawi, MPA, M.Si. *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), Hlm 165

³⁵ Sohari Sahrani, *Fikih Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), Hlm . 206-207

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

adalah merupakan hak bersama antara pemilik dan penggarap sesuai dengan kesepakatan yang mereka buat.³⁶

4. Dasar Hukum *Musaqah*

Dasar hukum *Musaqah* yang bersumber dari Al-Qur'an diantaranya adalah Q.S. al Maidah (5): 2

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”

Dalam ayat tersebut Allah SWT memerintahkan pada setiap orang-orang yang beriman untuk memenuhi janji-janji yang telah di ikrarkan, baik janji prasetya hamba kepada Allah SWT maupun janji yang antara manusia seperti yang bertalian dengan perdagangan, perkawinan dan sebagainya, selama janji itu tidak melanggar syariat Allah SWT.

Dasar hukum *Musaqah* ialah dalam sebuah hadis yang menerangkan tentang diperbolehkannya untuk pelaksanaan kerja sama dalam bentuk *Musaqah* untuk penggarap dan pemilik lahan pertanian.

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ عَلَى مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ

“Rasulullah Saw, bersabda: Rasulullah Saw melakukan kerjasama perkebunan dengan penduduk khaibar dengan ketentuan mereka mendapatkan sebagian dari hasil kebun atau pertanian.”(HR. Al-Jama’ah)

³⁶ Dr. H. Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007) cet. ke-2, hlm. 282

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan dalil diatas hukum *al-Musaqah* diperbolehkan dalam islam. Disamping itu memberikan mamfaat kedua belah pihak di bidang pertanian. Oleh kerena itu kerjasama ini dibenarkan.³⁷

Ibnu Qudamah, pengarang *al-Mughni* mengutip pendapat Abu Ja'afar Muhammad Ibnu 'Ali Husain Ibni 'Ali Ibni Abi Thalib Radhiyallahu 'anhum, Rasulullah Saw mempekerjakan penduduk Khaibar dengan upah separuh hasil yang keluar darinya. Kemudian diteruskan oleh Abu Bakar, 'Umar,'Utsman,'Ali, keluarga mereka sehingga sekarang dengan bagian sepertiga atau seperempat. Demikian ini tidak ada yang menyangkalnya sehingga statusnya menjadi *ijma'* sukuti (*ijma'* diam, yakni sebagian ulama melakukan sesuatu atau berpendapat sesuatu, sedangkan yang lain tidak memberi komentar apapun). Pendapat ini diikuti oleh 'Ali, Ibnu Mas'ud, 'Umar Ibnu 'Abdil 'Aziz, al-Qasim, 'Urwah, Ahmad Ibnu Hanbal, Abu Yusuf, Muhammad Ibnu al-Husain, dan lain sebagainya.

Abu Hanifah tidak sepakat dengan pendapat di atas. Ia menolak *Musaqah* berdasarkan argumentasinya sendiri. Adapun Imam Malik berpendapat disyari'atkannya *Musaqah* berdasarkan hadits-hadits Nabi Saw jika tanah dalam *Musaqah* didominasi kurma, yakni kurma lebih banyak daripada tanaman lainnya, seperti jika tanaman lain mencapai sepertiga kurma atau lebih sedikit lagi.

Imam Asy-Syafi'I berpendapat bahwa *Musaqah* disyari'atkan

³⁷ Farida Arianti, M.Ag, *Fikih Muamalah II*, (Batu Sangkar: STAIN Batusangkar Prees, 2014) cet. ke-1, hlm 104

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berdasarkan hadits diatas, sedangkan *Musaqah* tidak disyari'atkan berdasarkan hadits yang bersumber dari Rafi' Ibnu Khadij. Namun sebagian pembesar ulama asy-Syafi'i, seperti Ibnu Khuzaimah, Ibnu al-Mundzir, dan al-Khathabi memperbolehkan. Mereka menyatakan bahwa *Musaqah* dibolehkan dan telah dipraktikkan oleh kaum muslimin di berbagai negeri dan tidak ada seorang pun yang membatalkannya.³⁸

Dari penjelasan hadis-hadis diatas dan para ahli fiqh mereka sepakat memperbolehkan dalam akad *Musaqah*.

Sedangkan para ulama berbeda pendapat dalam masalah yang diperbolehkan dalam *Musaqah*. Menurut Imam Abu Dawud berpendapat bahwa yang boleh di *Musaqah*-kan hanya kurma. Menurut Imam Syafi'iyah yang boleh di *Musaqah*-kan hanyalah kurma dan anggur saja sedangkan menurut Hanafiyah semua pohon yang mempunyai akar kedasar bumi dapat di *Musaqah*-kan.

Menurut pendapat Imam Maliki dan Imam Hambali diperbolehkan untuk semua pohon yang memiliki akar kuat dan berbuah, seperti pohon kurma, pohon tin, pohon zaitun dan semisalnya.

Dari pendapat jumhur ulama diatas dapat diketahui bahwa tidak ada larangan melakukan akad *Musaqah* atau transaksi dalam bidang perkebunan, kecuali pendapat Imam Abu Hanifah dan Zufar yang berpendapat bahwa al-*Musaqah* dengan imbalan yang diambil dari sebagian hasil yang diperolehnya hukumnya batal, Karena menurut

³⁸ Prof. Dr. Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah dalam Pandangan 4 Mazhab*, (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif Griya Arga Permai, 2009) cet.ke-1, hlm 30

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hanifah hal itu termasuk akad sewa menyewa yang sewanya di bayar dari hasilnya dan hal tersebut dilarang oleh syara'.

Dari keterangan ini bahwa yang membatalkan *Musaqah* menurut Hanafiah tersebut bukanlah mutlak melainkan hanya sebagian akad dengan imbalan yang diambil dari sebagian hasil yang diperolehnya.

5. Rukun dan Syarat *Musaqah*

a. Rukun *Musaqah*

Setelah kita mengetahui pengertian *Musaqah* maka kita harus mengetahui rukun dan syarat akad *Musaqah* tersebut, agar dapat mengetahui hak, kewajiban, dan tanggung jawab diantara kedua belah pihak.

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa yang menjadi rukun dalam akad *al-Musaqah* adalah *Ijab* dari pemilik tanah perkebunan dan *Qabul* dari petani penggarap, dan pekerjaan dari pihak petani penggarap.

Sedangkan jumhur ulama yang terdiri atas ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah berpendirian bahwa transaksi *al-Musaqah* harus memenuhi lima rukun, yaitu:

- 1) Dua orang/pihak yang melakukan transaksi
- 2) Tanah yang dijadikan obyek *al-Musaqah*
- 3) Jenis usaha yang akan dilakukan petani penggarap
- 4) Ketentuan mengenai pembagian hasil *al-Musaqah* dan
- 5) *Shigat* (ungkapan) *ijab* dan *qabul*

Disamping itu, akad *al-Musaqah* baru bersifat mengikat,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menurut ulama Malikiyah, adalah dengan disetujuinya akad *al-Musaqah* antara pemilik tanah dengan petani penggarap. Sedangkan menurut ulama Hanabilah, akad *al-Musaqah* baru bersifat mengikat apabila petani penggarap memulai pekerjaannya, tanpa harus didahului oleh *qabul*. Menurut ulama Syafi'iyah akad *al-Musaqah* baru bersifat mengikat apabila apabila harus didahului dengan *qabul* dari petani penggarap.³⁹

Berdasarkan penjelasan rukun *Musaqah* diatas dapat di tarik kesimpulan bahwa rukun *Musaqah* ialah kedua belah pihak atau dua orang yang melakukan akad yaitu pemilik kebun dan penyadap kebun karet, objeknya yaitu berupa kebun karet dan yang harus di lakukan oleh penyadap adalah motong getah (memahat karet) dan merawat karet yang di ungkapkan dengan *ijab* dan *qabul*.

b. Syarat-syarat akad *Musaqah*

Adapun yang menjadi Syarat-syarat dalam akad *Musaqah* antara lain:

- a. Ahli dalam akad. Dalam hal ini *aqidain* harus berakal dan *mumayyiz*.

Menurut Hanafiah, baligh tidak menjadi syarat, sedangkan menurut ulama yang lain, baligh menjadi syarat sahnya *Musaqah*.

- b. Objek akad, yaitu harus pohon yang berbuah. Hanya saja dalam hal ini ada perbedaan pendapat, sebaagaimana telah dikemukakan di muka. Di samping itu objek pekerjaan yaitu pohon harus jelas dan diketahui.

³⁹ Dr. H. Nasrun Haroen, MA, et, al, Op. cit, hlm 283

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Membebaskan *'amil* dari pohon. Dalam hal ini pemilik tanah atau kebun harus menyerahkan sepenuhnya pohon yang akan dirawat atau digarap kepada penggarap. Apabila disyaratkan pekerjaan dilakukan oleh kedua belah pihak maka akad *Musaqah* menjadi batal atau *fasid*.
- d. Kepemilikan bersama dalam hasil yang diperoleh. Yakni hasil yang diperoleh dibagi di antara pemilik dan penggarap dengan kadar pembagian yang jelas.

Dari syarat-syarat di atas dapat di simpulkan bahwa syarat akad *Musaqah* ialah berupa perkebunan kebun karet yang di sadap dan dirawat dimana pemilik kebun menyerahkan sepenuhnya pengurusan kebun karet kepada pengarap/penyadap, dan hasil yang diperoleh dibagi dua sesuai dengan kesepakatan antara pemilik kebun dan penyadap kebun karet.

6. Hukum *Musaqah Shahih* dan *Fasid* (Rusak)

a. Hukum *Musaqah* yang *Shahih*

Ada beberapa ketentuan hukum yang berlaku untuk *Musaqah* yang *shahih*. Menurut ulama Hanafiah mengemukakan tentang ketentuan hukum yang berlaku untuk *Musaqah* sebagai berikut.

- 1) Semua pekerjaan yang berkaitan dengan pemeliharaan pohon merupakan kewajiban penggarap, sedangkan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh pohon, seperti biaya perawatan dan pemeliharaan menjadi tanggung jawab bersama antara pemilik dan penggarap.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Hasil yang diperoleh dibagi antara kedua belah pihak berdasarkan syarat-syarat yang disepakati.
- 3) Apabila pohon tidak menghasilkan buah, maka kedua belah pihak tidak mendapatkan apa-apa.
- 4) Akad *Musaqah* merupakan akad yang lazim atau mengikat bagi kedua belah pihak. Oleh karena itu, masing-masing pihak tidak bisa menolak untuk melaksanakannya atau membatalkannya tanpa persetujuan pihak lain, kecuali karena udzur.
- 5) Boleh menambah hasil dari ketetapan yang telah disepakati.
- 6) Penggarap tidak boleh memberikan *Musaqah* kepada orang lain, kecuali apabila diizinkan oleh pemilik pohon. Apabila ia melakukan penyimpangan, dengan memberikan garapan *Musaqah* kepada orang lain, maka buah yang dihasilkan untuk pemilik pohon, dan penggarap pertama tidak mendapat upah, sedangkan untuk penggarap kedua diberikan upah yang sepadan dengan pekerjaannya.

Menurut ulama Malikiyah Pada umumnya menyepakati hukum-hukum yang ditetapkan ulama Hanafiyah di atas. Namun demikian, mereka berpendapat dalam hal penggarapan kebun dapat dibagi kepada tiga bagian, yaitu sebagai berikut:

- 1) Sesuatu yang tidak berhubungan dengan buah tidak wajib dikerjakan dan tidak boleh di syaratkan.
- 2) Sesuatu yang berkaitan dengan buah yang membekas di tanah, tidak wajib dibanahi oleh penggarap.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) Sesuatu yang berkaitan dengan upah, tetapi tidak tetap adalah kewajiban penggarap, seperti menyiram atau menyediakan alat garapan, dan lain-lain.

Menurut Syafi'iyah dan Hanabilah sepakat dengan ulama Malikiyah dalam membatasi pekerjaan penggarap di atas, dan menambahkan bahwa segala pekerjaan yang rutin setiap tahun adalah kewajiban penggarap, sedangkan pekerjaan yang tidak rutin adalah kewajiban pemilik tanah.⁴⁰

Berdasarkan pendapat beberapa ulama diatas dapat disimpulkan bahwa hukum *Musaqah* dikategorikan sohih apabila antara pemilik tanah dan penggarap mempunyai batasan dalam pekerjaan masing-masing sesuai dengan kesepakatan bersama agar salah satu pihak tidak bisa berbuat sewenang-wenangnya dalam perjanjian akad *Musaqah* tersebut.

b. Hukum *Musaqah* Yang *Fasid* (Rusak)

Akad *Musaqah* menjadi fasid karena tidak terpenuhinya salah satu syarat yang telah ditentukan syara'. Menurut Hanafiyah, hal-hal yang menyebabkan *fasid*-nya akad *Musaqah* adalah sebagai berikut.

- 1) Adanya syarat bahwa hasil yang diperoleh semuanya untuk salah satu saja. Dalam hal ini makna syirkah menjadi tidak ada.
- 2) Adanya syarat bahwa sebagian tertentu dari hasil yang diperoleh untuk salah satu pihak.

⁴⁰ Rachmat Syafe'I, op.cit., hlm. 217

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) Adanya syarat bahwa pemilik kebun ikut serta melakukan penggarapan.
- 4) Adanya syarat bahwa pemetikan dibebankan kepada penggarap karena penggarap hanya berkewajiban memelihara tanaman sebelum hasilnya dipetik. Adapun sesudahnya menjadi kewajiban kedua belah pihak.
- 5) Adanya syarat bahwa pemeliharaan setelah pembagian hasil menjadi kewajiban penggarap, karena hal itu bukan garapan *Musaqah*.
- 6) Adanya syarat bahwa penggarap harus tetap bekerja setelah selesainya masa perjanjian *Musaqah*.
- 7) Adanya kesepakatan terhadap masa yang menurut kebiasaan buah tidak mungkin berhasil dalam waktu atau masa tersebut, karena hal itu merugikan penggarap dan tidak akan tercapainya tujuan akad *Musaqah*.
- 8) *Musaqah* digarap oleh banyak orang sehingga penggarap membagi lagi kepada penggarap lainnya.⁴¹

Dampak *Musaqah fasid* menurut ulama Malikiyah jika *Musaqah* rusak sebelum penggarapan upah tidak diberikan. Sebaliknya apabila *Musaqah* rusak setelah penggarap bekerja atau pada pertengahan *Musaqah*, penggarap berhak mendapatkan upah atas pekerjaannya, baik sedikit maupun banyak.⁴²

⁴¹ Ahmad Wardi Muslich., op.cit., hlm. 413

⁴² Rachmat Syafe'I, op.cit., hlm. 218

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari pengertian diatas yang menyebabkan akad *Musaqah fasid* rusak adalah bahwa masing-masing kedua belah pihak tidak mengetahui bagiannya masing-masing dari hasil yang diperoleh, mensyaratkan uang dalam jumlah yang ditentukan, mensyaratkan pemilik ikut serta melakukan pengarapan atau mensyaratkan mengerjakan pekerjaan lain selain pohon yang di sepakati.

c. Yang Dibolehkan Dalam Akad *Musaqah*

Para Fuqaha berbeda pendapat mengenai apa saja yang boleh menjadi objek *Musaqah*. Diantara mereka ada yang membatasinya hanya pada pohon kurma saja, seperti pendapat Dawud, diantara mereka yang menambahkan, yaitu pohon anggur dan pohon kurma, seperti pendapat Imam Syafi'i. Di antara mereka ada yang memperluas cakupannya, misalnya penganut Mazhab Hanafi.

Sedangkan menurut Imam Malik, *Musaqah* dibolehkan untuk semua pohon yang memiliki akar kuat, seperti delima, tin, zaitun, dan pohon-pohon yang serupa dengan itu, dan dibolehkan pula untuk pohon- pohon yang berakar tidak kuat, seperti semangka dan keadaan pemilik tidak lagi memiliki kemampuan untuk menggarapnya.⁴³ Menurut penganut mazhab Hanbali, *Musaqah* diperbolehkan untuk semua pohon yang buahnya dapat dimakan.

Dalam kitab Al-Mughni, disebutkan *al-Musaqah* dibolehkan untuk pohon tadaah hujan, sebagaimana ia juga diperbolehkan untuk

⁴³ Ismail Nawawi, Fiqh Muamalah klasik dan kontemporer (Bogor: penerbit ghalia Indonesia, 2012), Hlm. 167

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pohon- pohon yang perlu disiram.

Dari pendapat ulama diatas dapat disimpulkan yang diperbolehkan dalam akad *Musaqah* ialah diperbolehkan untuk semua jenis-jenis pohon yang memiliki akar kuat seperti pohon delima, zaitun, karet dan sawit. Dan berlaku juga untuk pohon yang berakar tidak kuat, semangka dan lain sebagainya selagi pohon tersebut dapat dimanfaatkan untuk menjadi objek *Musaqah*.

7. Berakhirnya akad *Musaqah*

Musaqah berakhir karena beberapa hal berikut.

- a. Perkerja melarikan diri. Dalam kasus ini, pemilik tanah boleh membatalkan transaksi berdasarkan pendapat yang mengkategorikannya sebagai transaksi boleh (tidak mengikat). Jika berdasarkan pendapat yang mengkategorikannya transaksi yang mengikat, seorang hakim mempekerjakan orang lain yang menggantikannya.
- b. Pekerja tidak mampu bekerja. Dalam kasus ini, pemilik lahan boleh mempekerjakan orang lain yang menggantikannya dan upah menjadi hak nya karena ia yang mengerjakan pekerjaan.
- c. Salah satu dari dua pihak meninggal dunia atau gila. Ini berdasarkan pendapat yang mengkategorikannya sebagai tidak boleh (tidak mengikat). Adapun berdasarkan pendapat yang mengkategorikannya sebagai transaksi yang mengikat, maka ahli waris atau walinya yang menggantikan posisinya.
- d. Kesepakatan kedua belah pihak untuk mengakhiri transaksi dengan kerelaan.⁴⁴

⁴⁴ Prof. Dr. Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, op. cit, hlm 310

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8. Hikmah *Musaqah*

Ada orang kaya yang memiliki tanah dan ditanami pohon kurma dan pohon-pohon lainnya, tetapi dia tidak mampu untuk memelihara pohon ini karena ada suatu halangan yang menghalanginya. Maka Allah yang Maha Bijaksana memperbolehkan orang itu untuk mengadakan suatu perjanjian dengan orang yang dapat memeliharanya, yang masing-masing pihak mendapatkan bagian dari buah yang dihasilkan. Dalam hal ini ada dua hikmah:

- a. Menghilangkan kemiskinan dari pundak orang-orang miskin sehingga dapat mencukupi kebutuhannya.
- b. Saling tukar manfaat diantara manusia.

Di samping itu ada *faedah* lain bagi pemilik pohon, yaitu karena pemeliharaan telah berjasa merawat hingga pohon menjadi besar. Kalau seandainya pohon itu dibiarkan begitu saja tanpa disirami tentu dapat mati dalam waktu yang singkat. Belum lagi *faedah* dari adanya ikatan cinta dan kasih sayang antara sesama manusia, maka jadilah umat ini umat yang bersatu dan bekerja untuk kemaslahatan, sehingga apa yang diperbolehkan mengandung *faedah* yang besar.⁴⁵

Dari uraian bab diatas dapat disimpulkan bahwa akad adalah suatu perjanjian atau ikatan yang terjadi antara kedua belah pihak, yang satu menyatakan *ijab* dan yang kedua menyatakan *qabul*, yang kemudian menimbulkan sebuah akibat-akibat hukum. Dalam fiqh muamalah ada beberapa bentuk akad dalam bidang pertanian antara lain ialah akad

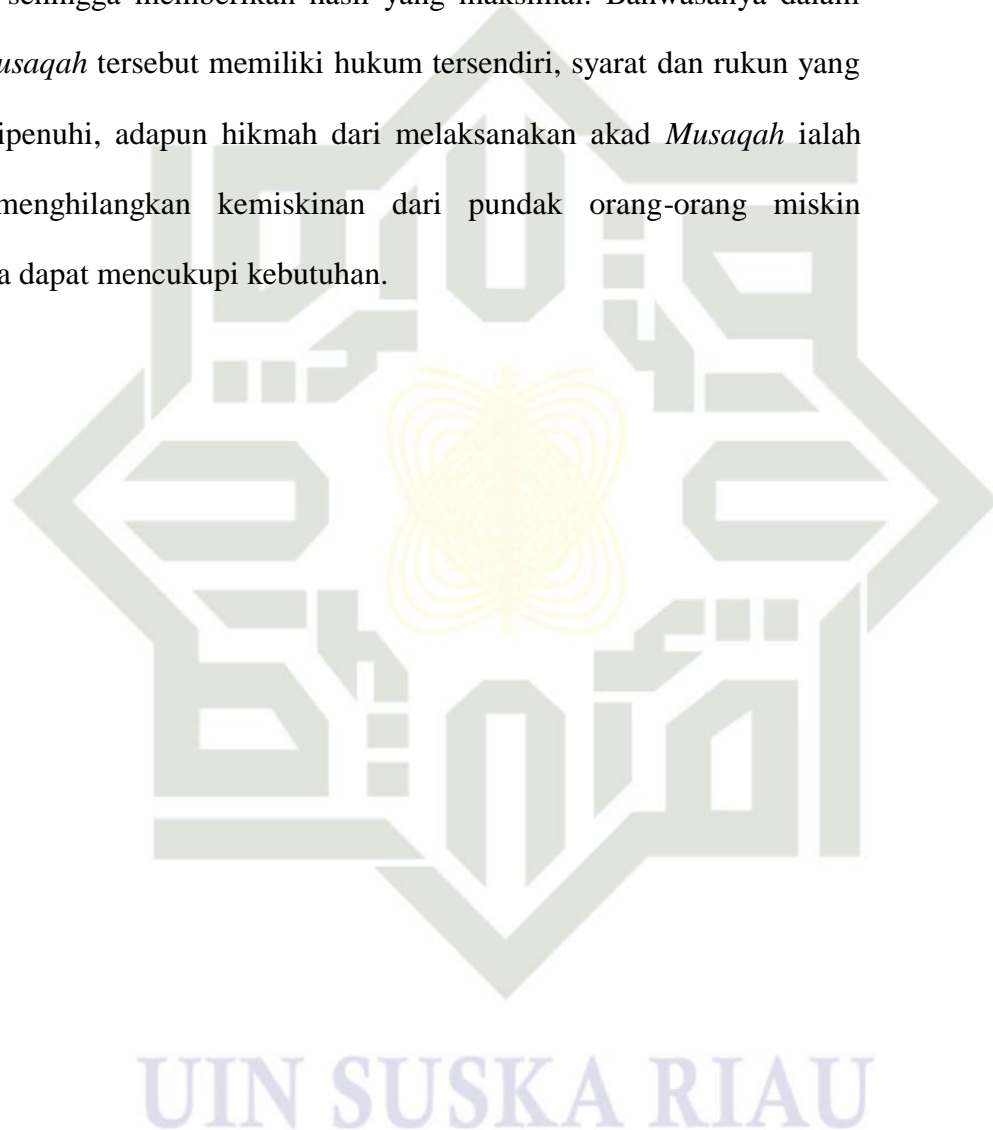
⁴⁵ Abdul Rahman Ghazaly, et, al., op.cit., hlm. 119

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Muzara'ah, akad *Mukhabarah* dan akad *Musaqah*.

Dalam hal ini penulis beranggapan bahwa akad *Musaqah* adalah sebuah bentuk kerja sama antara kedua belah pihak yaitu pemilik kebun dan penggarap dengan tujuan agar kebun tersebut dapat dipelihara dan dirawat sehingga memberikan hasil yang maksimal. Bahwasanya dalam akad *Musaqah* tersebut memiliki hukum tersendiri, syarat dan rukun yang harus dipenuhi, adapun hikmah dari melaksanakan akad *Musaqah* ialah dapat menghilangkan kemiskinan dari pundak orang-orang miskin sehingga dapat mencukupi kebutuhan.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian dan analisis yang telah penulis paparkan pada bab-bab sebelumnya mengenai Pelaksanaan Akad *Musaqah* Antara Pemilik Kebun Karet Dengan Penyadap Dalam Perspektif Fiqih Muamalah Studi Kasus Desa Pangkalan Kapas Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar, maka penulis mengambil beberapa kesimpulan dari pembahasan atau hasil dari penelitian tersebut sebagai berikut:

1. Pelaksanaan akad (*Musaqah*) kebun karet di Desa Pangkalan Kapas ialah dengan menggunakan konsep kerjasama dalam bentuk akad *Musaqah* yaitu pembagian hasil dilakukan menurut adat kebiasaan yang telah menjadi ketentuan hukum adat telah disetujui dan dijalankan oleh masyarakat di Desa Pangkalan Kapas. Dan cara pembagian dari hasil getah karet tersebut dibagi menurut kesepakatan antara pemilik kebun dan penyadap dengan menyebutkan bagian hasil dengan jelas yaitu, 1/3. Perjanjian Bagi hasil kebun karet dilakukan secara lisan menurut mereka hal tersebut lebih mudah dan tidak lama dari pada sistem perjanjian yang tertulis.
2. Tinjauan Fiqih Muamalah terhadap sistem pelaksanaan akad *Musaqah* antara pemilik kebun dan penyadap di Desa Pangkalan Kapas sudah sesuai dengan rukun dan syarat-syarat *Musaqah* dalam Islam, dimana pemilik kebun dan penyadap melakukan kesepakatan dan perjanjian Bagi Hasil yang mana jumlahnya jelas, setelah rukun dan syarat telah terpenuhi maka dapat disebut

dengan praktek *Musaqah* dalam hukum Islam. Maka perjanjian akad bagi hasil karet yang terjadi di Desa Pangkalan Kapas sah dan di bolehkan menurut Syari'at Islam.

B. Saran

1. Pelaksanaan akad (*Musaqah*) kebun karet dan penyadap yang awalnya dilakukan secara lisan sebaiknya dirubah dengan perjanjian yang tertulis agar dapat dijadikan bukti dan kepastian hukum, hal tersebut untuk menghindari perselisihan antara kedua belah pihak seperti halnya putusnya hubungan kekeluargaan antara pemilik kebun dan penyadap kebun karet.
2. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan masukan dan motivasi bagi para petani (penyadap karet) dan pemilik lahan dalam upaya meningkatkan sistem pelaksanaan akad *Musaqah* antara pemilik kebun karet dengan penyadap ini yang sesuai dengan syari'at Islam.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd. Rahman Dahlan. 2014. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Amzah. Suhendri Hendi. 2014. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: rajawali Pers
- Abdul Rahman Ghazali Dkk. 2012. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana.
- Abdul Rahman Ghazaly dan Ghuftron Ihsan. 2018. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Prenadamedia.
- Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar. 2009. *Ensiklopedi Fiqih Muamalah dalam Pandangan 4 Mazhab*. Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif Griya Arga Permai.
- Ahmad Wardi Muslich. 2003. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Penerbit Amzah
- Ahmad Wardi Muslich. 2010. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Amzah.
- Akhmad Mujahidin. 2016. *Hukum Perbankan Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Oni Sahrni Dan Hasanuddin. 2016. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers
- Mardani. 2013. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Burhan Bungin. 2013. *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*. Jakarta: Kencana.
- Chairuman Pasaribu K. Lubis. 1996. *Hukum Perjanjian Dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Dimyauddin Djuwaini. 2010. *Pengantar Fiqih Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Djazuli. 2006. *Kaidah-kaidah Fikih*. Jakarta: Kencana Pranadamedia Group
- Basiq Djalil. 2010. *Ilmu Ushul Fiqih I dan II*. Jakarta: Kencana Pranadamedia Group
- Etta Mamang Sangadji dan Sopiah. 2010. *Metodologi Penelitian, Pendekatan Praktis dalam Penelitian*. Yogyakarta: CV ANDI.
- Fadida Arianti. 2014. *Fikih Muamalah II*. Batu Sangkar: STAIN Batusangkar Prees
- Irawan Soehartono. 2008. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Israil Nawawi, MPA. 2012. *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Ismaail Nawawi. 2012. *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Bogor: penerbit ghalia Indonesia.
- Muhammad Syafi'i Antonio. 2001. *Bank Syariah Dari Teori ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani.
- Muhammad,. 2008. *Metodelogi Penelitian Ekonomi Islam*. Jakarta: PT Rajawali Perasada.
- Neng Hurhasanah. 2015. *Mudharabah Dalam Teori Dan Praktik*. Bandung: Pt Refika Aditama.
- Satria Effendi. 2012. *Ushul Fiqh*. Jakarta: kencana Pranadamedia Group.
- Chairuman Pasaribu. 1996. *Hukum perjanjian dalam Islam*. Jakarta:Sinar Grafika.
- Ibnu Rusyd. 1990. *Bidayatul Mujtahid jus III*. Semarang: Asy-Syifa.
- Sohari Sahrani. 2011. *Fikih Muamalah*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Nasrun Haroen. 2007. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Sonny Leksono. 2013. *Penelitian Kualitatif Ilmu Ekonomi*. Jakarta: rajawali pers.
- Sonny Leksono. 2013. *Penelitian Kualitatif Ilmu Ekonomi*. Jakarta: Rajawali pers.
- Sugiyono. 2007. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta.
- Saifuddin Azwar. 2003. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: CV Alfabeta.
- Syafii jafri. 2008. *Fiqh Muamalah*. Pekanbaru: Suska Press.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

PEDOMAN WAWANCARA

1. Apa mata pencarian penduduk Desa Pangkalan Kapas?
2. Faktor apa yang melatar belakangi bapak menyerahkan kebun karetinya kepada orang lain?
3. Bagaimana sistem pelaksanaan akad perjanjian antara pemilik kebun karet dengan penyadap yang selama ini lakukan masyarakat di Desa Pangkalan Kapas?
4. Apakah ada persyaratan untuk dapat menyadap kebun karet bapak?
5. Bagaimana sistem penyadapannya?
6. Kapan pembagian dari hasil getah karet dilakukan bapak?
7. Bagaimana sistem pembagian Bagi Hasil kebun karet antara pemilik kebun karet dan penyadap di Desa Pangkalan Kapas?
8. Alat apa saja yang dibutuhkan dalam proses pembekuan dan pengangkatan getah karet?
9. Siapa yang menanggung biaya perawatan dari kebun karet tersebut seperti, pupuk, alat pemahat karet (pahat), wadah getah karet (batok) dan dll?
10. Bagaimana cara bapak/ibu menetapkan harga penjualan karet (parah)?
11. Pernahkan terjadi perselisihan selama berlangsungnya pelaksanaan akad kerjasama kebun karet ini?
12. Bagaimana penyelesaian bila terjadi perselisihan antara pemilik kebun dan penyadap?
13. Apakah ada ketentuan batas jangka waktu selama menyadap keret dikebun bapak?

DOKUMENTASI PENELITIAN



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Skripsi dengan judul **Pelaksanaan Akad *Musaqah* Antara Pemilik Kebun Karet Dengan Penyadap Dalam Perspektif Fiqih Muamalah (Studi Kasus Desa Pangkalan Kapas Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar)**, yang ditulis oleh :

Nama : **Dedri Alvian**
 NIM : 11622103801
 Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 19 Agustus 2020

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

Drs. H. Zainal Arifin, MA

.....

Sekretaris

Basir, S. HL., MH

.....

Penguji I

Dra. Nurlaili, M. SI

.....

Penguji II

Hendri Sayuti, M.Ag

.....

Kepala Sub Bagian Akademik
 Fakultas Syariah dan Hukum

Jalinus, S.Ag

NIP. 19750801 200701 1 023

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sae Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



JURNAL HUKUM ISLAM

مجلة الأحكام الشرعية
Journal For Islamic Law

JL. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru- Panam Pekanbaru 28293
Po. Box 1004 Telp (0761) 561645 Fax. (0761) 562052
www. Jurnalhukumislam.com email. admin@jurnalhukumislam.com
Hp. 081275158167 - 085213573669

SURAT KETERANGAN

Penelola jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : **Dedri Alvian**
NIM : **11622103801**
Jurusan : **HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)**
Judul : **PELAKSANAAN AKAD *MUSAQAH* ANTARA PEMILIK KEBUN KARET DENGAN PENYADAP DALAM PERSPEKTIF FIQIH MUAMALAH (STUDI KASUS DESA PANGKALAN KAPAS KECAMATAN KAMPAR KIRI HULU KABUPATEN KAMPAR)**

Pembimbing : **Drs. H. Suhayib, M.Ag**

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal Skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, 31 Agustus 2020
Pimpinan Redaksi,

M. Alpi Syahrin, SH., MH., CPL
NIP. 19880430 201903 1 010



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SYARI'AH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Pekanbaru, 30 Desember 2019

: Uin.04/F.I/PP.01.1/10373/2019

: Penting

: *Pembimbing Skripsi*

Kepada

Yth. Dr. H. Suhayib, M.Ag.

Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru

Assalamu'alaikum warhamatullahi wabarakatuh

Bersama ini kami minta kesediaan Saudara untuk membimbing mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dalam menyusun Skripsi :

Nama : DEDRI ALVIAN

NIM : 11622103801

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) S1

Kepada Saudara diharapkan membimbing metodologi dan materi skripsi. Sebagai bahannya kami kirimkan proposal penelitian dimaksud dengan judul : "PELAKSANAAN AKAD MUSAQAH ANTARA PEMILIK KEBUN KARET DENGAN PENYEDAP DALAM PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH STUDI KASUS (DESA PANGKALAN KAPAS KECAMATAN KAMPAR KIRI HULU KABUPATEN KAMPAR)"

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Dekan

Wakil Dekan I

Dr. Drs. Heri Sunandar, Mcl.
NIP. 19660803 199303 1 004

Tembusan:

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Dilindungi Undang-Undang

Hal ini merupakan dokumen resmi UIN SUSKA RIAU

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SYARI'AH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

Dilarang mengundi Undang-Undang

a. Peringatan untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Penitipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

In.04/F.I/PP.00.9/10374/2019

Pekanbaru, 30 Desember 2019

Asas
(Satu) Proposal
Mohon Izin Riset

Kepada
th. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Provinsi Riau

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : DEDRI ALVIAN
NIM : 11622103801
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) S1
Semester : VII (Tujuh)
Lokasi : Desa Pangkalan Kapas Kecamatan Kampar Kiri Hulu
Kabupaten Kampar

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul
:PELAKSANAAN AKAD MUSAQAH ANTARA PEMILIK KEBUN KARET DENGAN
PENYEDAP DALAM PERSPEKTIF FIQIH MUAMALAH STUDI KASUS (DESA
PANGKALAN KAPAS KECAMATAN KAMPAR KIRI HULU KABUPATEN KAMPAR)

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai
tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan
memberikan izin guna terlaksana riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Rektor
Dekan

Dr. Drs. H. Hajar., M.Ag.
NIP. 19580712 198603 1 005

Tembusan :
Rektor UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



PEMERINTAH PROVINSI RIAU

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I & II Komp. Kantor Gubernur Riau
Jl. Jenderal Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39119 Fax. (0761) 39117, PEKANBARU
Email : dpmptsp@riau.go.id

Kode Pos : 28126



032010

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/29265
TENTANG

PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : UIN.00.11/PP.00.9/10374/2019 Tanggal 30 Desember 2019**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

1. Nama	: DEDRI ALVIAN
2. NIM / KTR	: 11622103801
3. Program Studi	: HUKUM EKONOMI SYARIAH
4. Jenjang	: S1
5. Alamat	: PEKANBARU
6. Judul Penelitian	: PELAKSANAAN AKAD MUSAQAH ANTARA PEMILIK KEBUN KARET DENGAN PENYADAP DALAM PERSPEKTIF FIQIH MUAMALAH STUDI KASUS (DESA PANGKALAN KAPAS KECAMATAN KAMPAR KIRI HULU KABUPATEN KAMPAR)
7. Lokasi Penelitian	: DESA PANGKALAN KAPAS KECAMATAN KAMPAR KIRI HULU KABUPATEN KAMPAR

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 30 Desember 2019



Ditandatangani Secara Elektronik Melalui :
Sistem Informasi Manajemen Pelayanan (SIMPEL)

DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI RIAU

Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bupati Kampar
3. Up. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik di Bangkinang
4. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
5. Yang Bersangkutan

Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, dan penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan umum.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

JALAN TUANKU TAMBUSAI TELP. (0762) 20146

BANGKINANG KOTA

Kode Pos : 28412

REKOMENDASI

Nomor : 070/BKBP/2020/58

Tentang

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kampar setelah membaca Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Nomor : 503/DPMPTSP/NON/2019/RSPT/29265 tanggal 30 Desember 2019, dengan ini memberi Rekomendasi /Izin Penelitian kepada:

Nama :
NIM :
Universitas :
Program Studi :
Jenjang :
Alamat :
Judul Penelitian :

: **DEDRI ALVIAN**
: 11622103801
: UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUSKA RIAU
: HUKUM EKONOMI SYARIAH
: S1
: PEKANBARU
: **PELAKSANAAN AKAD MUSYAQAH ANTARA PEMILIK KEBUN KARET DENGAN PENYADAP DALAM PERSPEKTIF FIQIH MUAMALAH STUDI KASUS (DESA PANGKALAN KAPAS KECAMATAN KAMPAR KIRI HULU KABUPATEN KAMPAR)**
: DESA PANGKALAN KAPAS KECAMATAN KAMPAR KIRI HULU KABUPATEN KAMPAR

Lokasi :

Dengan ketentuan sebagai berikut :

Tidak melakukan Penelitian yang menyimpang dari ketentuan dalam proposal yang telah ditetapkan atau yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan riset/prariset dan pengumpulan data ini.

Pelaksanaan kegiatan penelitian/pengumpulan data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan dihitung mulai tanggal rekomendasi ini dikeluarkan.

Demikian rekomendasi ini diberikan, agar digunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak yang terkait diharapkan untuk dapat memberikan kemudahan dan membantu kelancaran kegiatan Riset ini. Terima kasih.

Dikeluarkan di Bangkinang
pada tanggal 16 Januari 2020

an. **KEPALA BADAN KESBANGPOL KAB. KAMPAR**

Kabid. Ideologi, Wawasan Kebangsaan
dan Karakter Bangsa,

ONNITA, SE

Penata Tk. I

NIP. 19661009 198803 2 003

Rekomendasi ini disampaikan Kepada Yth;

1. Sr. Camat Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar di Gema
2. Sr. Kepala Desa Pangkalan Kapas Kecamatan Kampar Kiri Hulu.
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru.
4. Yang Bersangkutan.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



RIWAYAT HIDUP PENULIS

DEDRI ALVIAN, lahir di Pangkalan Kapas pada tanggal 07 Mei 1998. Anak Pertama dari Enam bersaudara, dari pasangan Dasril dan Darnilis. Pendidikan formal yang ditempuh oleh penulis adalah SDN 008 Pangkalan Kapas, lulus pada tahun 2010, selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan di MTS PP Ubudiyatussalam Lipat Kain, lulus pada tahun 2013. Setelah itu, penulis melanjutkan di MAS PP Ubudiyatussalam Lipat Kain, lulus pada tahun 2016. Kemudian pada tahun 2016 penulis melanjutkan studi pada Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau (UIN Suska Riau). *Alhamdulillah*, penulis dapat menyelesaikan studi pada tahun 2020 dengan menyandang gelar Sarjana Hukum (S.H).